

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN II

**Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2025**

**Jakarta
2025**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN II

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2025

Jakarta
2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan POM untuk Triwulan II Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Deputi II BPOM dalam Triwulan II Tahun 2025, serta merupakan implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Pedoman SAKIP Badan POM yang terbaru.

Dalam penyusunan LAKIP Interim ini, kinerja Deputi II BPOM diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Deputi II BPOM Tahun 2025–2029. Laporan ini memuat capaian indikator kinerja utama, analisis atas hasil yang diperoleh, serta identifikasi kendala dan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas ke depan.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyelenggaraan kinerja, masih terdapat berbagai tantangan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, melalui laporan ini, kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, serta memperkuat kontribusi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Deputi II BPOM selama Triwulan II Tahun 2025, serta dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai akuntabilitas kinerja Deputi II BPOM dan menjadi dasar perbaikan serta peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, Juli 2025

**Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik**



Mohamad Kashuri

Executive Summary

Pada Triwulan II Tahun 2025, Deputi II BPOM telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengawasan terhadap obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Pelaksanaan kinerja pada periode ini menunjukkan capaian yang positif dengan nilai kinerja organisasi sebesar 97,90, mencerminkan akuntabilitas pelaksanaan program dan efektivitas implementasi kegiatan.

Dari sisi anggaran, realisasi belanja Deputi II mencapai Rp7.230.935.663 setara dengan 44,78% dari pagu efektif sebesar Rp16.145.965.000, melampaui target triwulan II yang tercantum dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar 40%. Hal ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan disiplin dan selaras dengan tahapan pelaksanaan program.

Capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator utama telah mencapai atau melampaui target, antara lain: 1) Persentase Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu; 2) Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar; 3) Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, dan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan; 4) Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar , dan 5) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target antara lain: 1) Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam, Suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi ketentuan; 2) Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan ; 3) Persentase iklan Obat Bahan Alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi ketentuan. Sementara untuk 10 (sepuluh) indikator lain belum dapat dilakukan pengukuran kinerjanya pada triwulan ini.

Permasalahan utama yang memengaruhi pencapaian kinerja, antara lain belum tercapainya beberapa indikator strategis seperti kepatuhan fasilitas produksi dan distribusi serta kepatuhan iklan terhadap ketentuan, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pengawasan, perubahan definisi operasional, dan kendala teknis lapangan. Tingkat kepatuhan pelaku usaha, terutama UMKM, masih bervariasi akibat kurangnya pemahaman terhadap regulasi, sementara kapasitas SDM dan alokasi anggaran yang terbatas juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program secara optimal. Selain itu, perubahan kebijakan seperti pembatalan surat edaran terkait klasifikasi pelanggaran iklan dan penandaan berdampak pada penurunan capaian indikator meskipun tidak selalu mencerminkan penurunan kualitas pengawasan. Kualitas data dan pelaporan pengawasan oleh beberapa UPT yang belum optimal turut menjadi hambatan dalam evaluasi kinerja yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, efisiensi anggaran, serta reformulasi kebijakan teknis berbasis data dan risiko untuk mendukung perbaikan berkelanjutan.

Ke depan, Deputi II akan terus menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran berbasis hasil, serta meningkatkan efektivitas pengawasan untuk mendukung terwujudnya produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Daftar Isi

Isi

Kata Pengantar.....	i
Executive Summary	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vii
BAB I - Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi Deputi II.....	4
1.4 Isu Strategis	4
BAB II Perencanaan Kinerja.....	6
2.1 Uraian Singkat Renstra	6
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	8
2.3. Perjanjian Kinerja (PK).....	9
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	11
2.5. Metode Pengukuran	17
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	31
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2 Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	67
3.3 Realisasi Anggaran	68
BAB IV Penutup	69
Lampiran.....	72

Daftar Tabel

Tabel 1 : Sebaran pegawai di Deputi II BPOM	2
Tabel 2 : Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan.....	3
Tabel 3 : Rencana Kinerja Tahunan 2025.....	8
Tabel 4 : Perjanjian Kinerja Deputi II Tahun 2025.....	10
Tabel 5 : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2025	12
Tabel 6 : Kriteria Capaian Indikator Kinerja	28
Tabel 7 : Kriteria Predikat Nilai Kerja Organisasi.....	29
Tabel 8 : Nilai Kinerja Organisasi TW II tahun 2025	32
Tabel 9 : Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025	34
Tabel 10 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target Triwulan II 2025	36
Tabel 11 : Perbandingan Kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya	36
Tabel 12 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target Tahunan 2025	37
Tabel 13 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Triwulan II 2025	39
Tabel 14 : Perbandingan Kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya	39
Tabel 15 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Tahunan 2025	40
Tabel 16 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap target Triwulan II 2025	41
Tabel 17 : Perbandingan Kinerja Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya	42
Tabel 18 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap target Tahunan 2025.....	42
Tabel 19 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor terhadap target Triwulan II 2025.....	44
Tabel 20 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya.....	44
Tabel 21 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor terhadap target Tahunan 2025.....	45
Tabel 22 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025	46
Tabel 23 : Perbandingan Kinerja Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya.....	46
Tabel 24 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025.....	47

Tabel 25 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025	48
Tabel 26 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025	48
Tabel 27 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025	50
Tabel 28 : Perbandingan Kinerja Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya	50
Tabel 29 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025	50
Tabel 30 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025	52
Tabel 31 : Perbandingan Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan di triwulan Sebelumnya.....	52
Tabel 32 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025	52
Tabel 33 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025	54
Tabel 34 : Perbandingan Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan di triwulan Sebelumnya.....	54
Tabel 35 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025	54
Tabel 36 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025	56
Tabel 37 : Perbandingan Kinerja Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya.....	56
Tabel 38 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025	56
Tabel 39 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025	58
Tabel 40 : Perbandingan Kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya	58
Tabel 41 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025	58
Tabel 42 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025	60
Tabel 43 : Perbandingan Kinerja Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya.....	60
Tabel 44 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025	60
Tabel 45 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025	62
Tabel 46 : Perbandingan Kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya	62

Tabel 47 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025	62
Tabel 48 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target Triwulan II 2025	64
Tabel 49 : Perbandingan Kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya.....	64
Tabel 50 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target Tahunan 2025	65
Tabel 51 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos terhadap target Triwulan II 2025	66
Tabel 52 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos terhadap target Tahunan 2025	66
Tabel 53 : Pengukuran Tingkat Efisiensi per Sasaran Program.....	68

Daftar Gambar

Gambar 1 : Struktur Organisasi Deputi II BPOM4

PENDAHULUAN

BAB

I

**Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2025**

BAB I - Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif, baik dari segi pertumbuhan jumlah produk maupun diversifikasi jenisnya. Di tengah peluang tersebut, tantangan yang dihadapi Deputi II BPOM semakin kompleks. Beredarnya produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, penyalahgunaan klaim kesehatan dalam promosi, serta meningkatnya transaksi produk melalui platform digital menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan efektif.

Selain itu, tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi masih perlu ditingkatkan, begitu pula literasi masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu. Deputi II BPOM juga dihadapkan pada kebutuhan untuk mendukung inovasi industri nasional, khususnya dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya menuntut efisiensi dalam pelaksanaan program dan optimalisasi pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Deputi II BPOM memiliki peran yang sangat strategis. Deputi II bertugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat.

Melalui pengawasan yang efektif, edukasi publik, pemberdayaan pelaku usaha, serta transformasi pelayanan berbasis digital, Deputi II BPOM berupaya menciptakan ekosistem pengawasan yang adaptif, transparan, dan berdaya saing. Pelaksanaan tugas ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan dan mutu produk yang beredar, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan industri nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Deputi II BPOM merupakan salah satu unsur pelaksana teknis di lingkungan BPOM yang berperan penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi II BPOM bertugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dalam menjalankan tugas tersebut, Deputi II melaksanakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar, meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- Pelaksanaan kebijakan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPOM.

Sumber Daya Manusia

Deputi II BPOM memiliki peran strategis dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, yang memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memadai. Namun, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2024, Deputi II BPOM masih mengalami kekurangan SDM yang cukup signifikan. Saat ini, jumlah pegawai di Deputi II BPOM sebanyak 348 orang, sedangkan kebutuhan idealnya mencapai 476 pegawai, yang berarti terdapat gap kebutuhan SDM sebesar 128 pegawai. Dengan kondisi ini, tingkat pemenuhan pegawai baru mencapai 73,11%, sehingga optimalisasi sumber daya yang ada menjadi tantangan yang harus dihadapi

Rincian jumlah pegawai di tiap unit kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Sebaran pegawai di Deputi II BPOM

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	55
2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97
3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	72
4	Direktorat Pengawasan Kosmetik	68
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Deputi II	56 348

Komposisi Pegawai Deputi II BPOM Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Komposisi pegawai di lingkungan Deputi II Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan proporsi yang didominasi oleh pegawai perempuan, yaitu sebanyak 289 orang, sedangkan pegawai laki-laki berjumlah 59 orang.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, pegawai Deputi II BPOM terdiri atas:

- Pendidikan setingkat SLTA/sederajat: 1 orang
- Lulusan Diploma (D3/D4): 41 orang
- Lulusan Sarjana (S1): 129 orang
- Lulusan jenjang Profesi (Apoteker, Dokter, Dokter Hewan): 109 orang
- Lulusan Pascasarjana (S2): 64 orang
- Lulusan Doktoral (S3): 3 orang

Data ini mencerminkan bahwa sebagian besar pegawai Deputi II BPOM memiliki latar belakang pendidikan tinggi, dengan proporsi signifikan berasal dari jenjang sarjana dan profesi, yang sangat relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Komposisi Pegawai Deputi II BPOM Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan data kepegawaian Deputi II BPOM, total pegawai terbagi ke dalam beragam jabatan fungsional dan pelaksana dengan dominasi terbesar pada jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), yang mencapai 256 orang. Jumlah ini mencerminkan peran strategis PFM dalam mendukung pelaksanaan fungsi teknis pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Selain PFM, jabatan lain yang mendukung fungsi manajerial dan administratif juga tersebar secara proporsional, antara lain:

- Direktur sebanyak 5 orang,
- Penata Layanan Operasional sebanyak 14 orang,
- Arsiparis sebanyak 17 orang,
- Pranata Keuangan APBN sebanyak 13 orang, dan
- Pranata Komputer sebanyak 10 orang.

Sementara itu, terdapat jabatan-jabatan pendukung lainnya yang masing-masing memiliki kurang dari 10 pegawai, seperti Pelaksana (7 orang), Perencana (4 orang), serta Pengolah Data dan Informasi (2 orang). Beberapa jabatan hanya diisi oleh satu atau dua orang, seperti Pengadministrasi Perkantoran (1 orang) dan Penata Kelola Obat dan Makanan (2 orang).

Komposisi ini menggambarkan struktur organisasi yang didominasi oleh jabatan fungsional teknis, namun tetap didukung oleh peran strategis dari jabatan administratif dan manajerial, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi II BPOM dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi.

Tabel 2 : Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Direktur	5
2	PFM	256
3	Penata Layanan Operasional	14
4	Arsiparis	17
5	Pelaksana	7
6	Penata Kelola Obat dan Makanan	2
7	Pranata Komputer	10
8	Pengelola Layanan Operasional	2
9	Analis SDM Aparatur	5
10	Pranata Keuangan APBN	13
11	Pranata SDM Aparatur	5
12	Perencana	4

13	Penata Laksana Barang	2
14	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	3
15	Pengadministrasi Perkantoran	1
16	Pengolah Data dan Informasi	2

1.3 Struktur Organisasi Deputi II

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, Deputi II BPOM didukung oleh lima direktorat teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling bersinergi, yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik;
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Struktur organisasi Deputi II dirancang untuk memperkuat integrasi antara aspek regulasi, pengawasan, pelayanan publik, pemberdayaan, dan pengembangan daya saing industri. Setiap direktorat bekerja dalam koordinasi yang erat untuk memastikan bahwa seluruh proses pengawasan, mulai dari penyusunan regulasi, pre-market evaluation, pengawasan produksi dan distribusi, hingga pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, berjalan secara harmonis, efektif, dan selaras dengan tujuan besar BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing nasional.



Gambar 1 : Struktur Organisasi Deputi II BPOM

1.4 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi II BPOM menghadapi sejumlah isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan program dan pencapaian kinerja, yaitu:

1. Pengawasan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
Transformasi pengawasan dan pelayanan publik menuju sistem digital menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan.

- Deputi II BPOM mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan produk dan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- 2. Pemahaman dan Kepatuhan Pelaku Usaha/Stakeholder terhadap Regulasi
Masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami ketentuan regulasi yang berlaku. Deputi II BPOM terus meningkatkan edukasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi untuk membangun kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan pelaku usaha.
 - 3. Literasi Konsumen yang Rendah dan Peran Serta Masyarakat
Tingkat literasi masyarakat mengenai keamanan, mutu, dan klaim produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik masih perlu ditingkatkan. Deputi II BPOM berupaya memperluas kegiatan edukasi publik untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan.
 - 4. Kapasitas dan Daya Saing UMKM
Sebagian besar UMKM di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik belum memiliki kapasitas produksi dan pemenuhan standar yang optimal. Deputi II BPOM fokus pada program pendampingan dan fasilitasi penerapan standar mutu dan keamanan bagi UMKM.
 - 5. Pengembangan dan Pemanfaatan Obat Bahan Alam
Potensi obat bahan alam di Indonesia sangat besar namun masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Deputi II BPOM mendorong inovasi dan pengembangan produk berbasis bahan alam yang memenuhi aspek keamanan, mutu, dan manfaat.
 - 6. Pencantuman Promosi/Iklan yang Overclaim
Masih ditemukan praktik promosi dan iklan produk yang mengandung klaim berlebihan atau tidak sesuai dengan ketentuan. Deputi II BPOM memperketat pengawasan dan pembinaan terkait ketataan iklan untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan.
 - 7. Peredaran Produk OBA Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang
Produk obat tradisional yang mengandung BKO dan kosmetik dengan bahan berbahaya masih beredar di pasaran. Deputi II BPOM terus melakukan intensifikasi pengawasan, sampling, dan penindakan terhadap produk-produk tersebut untuk menjaga keselamatan konsumen.
 - 8. Pengawasan Peredaran OBA, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik di E-commerce
Maraknya transaksi online menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan produk ilegal dan tidak memenuhi syarat. Deputi II BPOM memperkuat pengawasan berbasis patroli siber dan bekerja sama dengan platform e-commerce untuk mengendalikan peredaran produk.
 - 9. Efisiensi Anggaran
Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, Deputi II BPOM berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan melalui prinsip efisiensi anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja, dengan perencanaan dan eksekusi yang lebih tepat sasaran.

PERENCANAAN KINERJA

BAB

II

**Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2025**

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Uraian Singkat Renstra

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Badan POM Tahun 2025-2029, maka Visi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- 4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Dalam upaya mewujudkan visi, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menetapkan misi organisasi yang sejalan dengan misi BPOM sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Membangun SDM unggul terkait obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Deputi II BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan Deputi II BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi, yang sejalan dengan Tujuan BPOM:

1. **Terwujudnya Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen Deputi II BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, Deputi II BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggariskan pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Deputi II BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, Deputi II BPOM berkomitmen untuk

terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Deputi II BPOM merupakan acuan bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025. Rencana Kinerja ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik No. HK.02.02.4.09.24.46 Tahun 2024 pada tanggal 19 September 2024. Terdapat perubahan target kinerja Deputi II BPOM pada tahun 2025, yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM tahun 2025, sehingga perhitungan kinerja akan menggunakan target sebagaimana terdapat pada Perjanjian Kinerja. Rencana Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2025 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3 : Rencana Kinerja Tahunan 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00
2		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	67,00
3		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	61,00
4		Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,00
5		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00
6	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	20,00%
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	84,00
8	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	87,50

No	Sasaran	Indikator	Target
9	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase kemandirian pelaku usaha OBA dalam rangka inovasi obat bahan alam	51,00%
10		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60,00
11		Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56,00%
12		Persentase Industri Obat bahan Alam yang meningkat maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12,00
13	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,69
14	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91,68
15		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,45
16		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	95,36
17		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,40

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM merupakan dokumen formal yang memuat komitmen antara pejabat yang diberi amanah sebagai Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II) dengan Kepala Badan POM selaku atasan langsung. Dokumen ini berisi pernyataan kesanggupan Deputi II dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Badan POM, dengan mengacu pada indikator kinerja yang terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat.

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun sebagai bagian dari proses manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management), yang bertujuan untuk:

- Menjadi dasar evaluasi kinerja individu pimpinan unit organisasi,
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja unit kerja,
- Mendorong pencapaian sasaran strategis organisasi melalui indikator kinerja utama yang jelas dan terukur,

- Memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Pada Tahun 2025, Deputi II BPOM menetapkan 25 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengukuran capaian kinerja. Indikator tersebut mencakup aspek pengawasan produk, pelayanan publik, inovasi, koordinasi lintas sektor, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 4 : Perjanjian Kinerja Deputi II Tahun 2025

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00%
	IKSP 2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00%
	IKSP 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00%
	IKSP 4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83,00
	IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00%
	IKSP 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86,00%
	IKSP 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85,00%
	IKSP 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81,00%
	IKSP 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,00%
	IKSP 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89,00%
	IKSP 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,00%
	IKSP 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78,00%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	IKSP 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87,00%
	IKSP 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71,00%
Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK dan Kos	IKSP 15	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	2,00%
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IKSP 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86,87
Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	51,00%
	IKSP 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60,00%
	IKSP 19	Persentase Industri Kosmetik yang mengikti program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56,00%
	IKSP 20	Persentase Industri Obat Bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12,00%
Layanan Publik BPOM yang Prima	IKSP 21	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,70
Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSP 22	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	89.96
	IKSP 23	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	81.66
	IKSP 24	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	5,00
	IKSP 25	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos	2.95

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Deputi II BPOM menyajikan target kinerja Triwulan pada tiap indikator kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja. RAPK Deputi II BPOM tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2025

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	3.582.245.500
	IKSP 2	Persentase Seplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	2.569.919.500
	IKSP 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	3.552.695.000
	IKSP 4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik											83	3.598.766.000
	IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	902.584.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	354.341.000
	IKSP 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	354.341.000
	IKSP 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	1.694.533.000
	IKSP 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	354.341.000
	IKSP 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	354.341.000
	IKSP 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	957.720.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSP 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	500.130.000
	IKSP 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	500.130.000
	IKSP 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	931.538.000
Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK dan Kos	IKSP 15	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman											2	1.000.000.000
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IKSP 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu											86.87	5.226.369.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSP 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	40	40	40	41.5	41.5	41.5	42.5	42.5	42.5	45	45	51	7.028.831.000
	IKSP 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos						3	10	15	20	35	45	60	4.964.569.000
	IKSP 19	Persentase Industri Kosmetik yang mengikti program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh												56	1.100.000.000
	IKSP 20	Persentase Industri Obat Bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini												12	400.000.0000
Layanan Publik BPOM yang Prima	IKSP 21	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan												4.7	8.760.036.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSP 22	Nilai Pembangunan Zi Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												89.96	1.538.957.950
	IKSP 23	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												81.66	304.760.600
	IKSP 24	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												5	960.170.500
	IKSP 25	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos												2.95	425.419.950

2.5. Metode Pengukuran

Metode pengukuran indikator kinerja disusun untuk memastikan bahwa setiap pencapaian dapat diukur secara objektif, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen metode pengukuran ini memuat definisi operasional indikator, satuan ukur, cara penghitungan, unit penanggung jawab data, serta kriteria keberhasilan capaian.

1. Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu

Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah.

Kriteria Obat Bahan Alam aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE yang berlaku, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling obat bahan alam dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 . dengan ketentuan:

- 1) Yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- 2) Jika poin 1,2 dan 3 tidak terpenuhi maka tidak dilakukan pengujian.
- 3) Jika poin 4 tidak dipenuhi maka tetap dilakukan pengujian.
- 4) Untuk sampel dengan Klaim risiko tinggi yang tidak memenuhi point 1 maka tetap dilakukan pengujian.

Sampel obat bahan alam tidak aman dan bermutu dihitung berdasarkan satuan bets. Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan.

2. Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu

Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.

Kriteria Suplemen Kesehatan aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE yang berlaku, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling obat bahan alam dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 . yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Sampel suplemen kesehatan tidak aman dan bermutu dihitung berdasarkan satuan bets.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan.

3. Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangi, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling kosmetik dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel kosmetik meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel kosmetik mencakup sampel UPT.

Kriteria kosmetik aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE/bukan produk ilegal termasuk palsu, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling kosmetik dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin c.1 hingga poin c.5 . yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin c.1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin c.2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk kosmetik TMS dihitung berdasarkan satuan bets.

Jika tidak termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel kosmetik yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Kometik yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Kosmetik.

4. Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan instrumen yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan pengawasan obat dengan mengacu pada instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Admistrasi Negara (LAN).

Ruang lingkup kebijakan yang disepakati sebagai Objek yang akan dinilai yaitu kebijakan dalam bentuk Peraturan Badan POM yang memenuhi ketentuan:

- a) Memiliki jangka waktu pemberlakuan selama 2 (dua) tahun terakhir;

- b) Bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang hanya memiliki materi muatan pencabutan peraturan perundang-undangan lainnya,
- c) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Badan POM,
- d) Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulas Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijaksanaan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan), dan
- e) Pengukuran Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan setiap tahun.

Cara Perhitungan dan Formula: Berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh LAN.

Kriteria yang digunakan adalah:

- a) 91,00 – 100 : Unggul
- b) 80,00 – 90,99 : Sangat Baik
- c) 65,00 – 79,99 : Baik
- d) 50,00 – 64,99 : Cukup
- e) < 50,00 : Kurang

5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari lintas sektor terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat. Lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dan Direktorat Pengawasan Kosmetik.

6. Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan, dan Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah jumlah sarana produksi Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan

Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, dan Industri Kosmetik.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada peraturan dan/atau pedoman yang berlaku terkait pengawasan Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Cara Perhitungan:

= $(\text{Jumlah sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan} / \text{Jumlah sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperiksa}) \times 100\%$

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran indikator kinerja ini yaitu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pengawasan Kosmetik.

7. Persentase Iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Pengawasan iklan dilakukan baik rutin dan insidental terhadap iklan yang dipublikasikan sesuai dengan target dan tanggungjawab UPT berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Kesesuaian pelaksanaan pengawasan iklan oleh UPT mengacu pada Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta peraturan mengenai periklanan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik maupun ketentuan terkait.

Cara perhitungan: Jumlah iklan yang diawasi sesuai ketentuan/jumlah target pengawasan iklan *100%.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dan Direktorat Pengawasan Kosmetik.

8. Persentase Kabupaten/kota sadar Jamu Aman

Program Sadar Jamu Aman merupakan upaya peningkatan pelestarian jamu melalui pengembangan dan pemanfaatan jamu serta kesadaran konsumsi jamu yang aman untuk kesehatan oleh masyarakat. Program Sadar Jamu Aman akan dilaksanakan dengan melibatkan Kabupaten/Kota serta *influencer*.

Perhitungan indikator= Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman .

Cara Perhitungan Jumlah Kabupaten/Kota yang berkomitmen melaksanakan Program Sadar Jamu Aman :

Setiap tahun target nya 10 kabupaten/kota yang berkomitmen melaksanakan program sadar jamu Aman dan tiap tahun kumulatif dari tahun sebelumnya sehingga di akhir RPJMN tahun 2029 jumlah nya 50 kabupaten/kota yang melaksanakan program sadar jamu aman.

Target tahunan (%) dihitung dari capaian kabupaten/kota pertahun dibagi jumlah komulatif kabupaten/kota di akhir RPJMN tahun 2029 (50).

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman adalah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

9. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM.

Kesadaran diukur melalui 3 aspek, yaitu:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi sediaan farmasi dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan makanan yang aman dan bermutu.
- c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan Makanan dengan baik.

Indeks kesadaran masyarakat dilakukan melalui survei dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling* dimana pengembangan desain dan metodologi survei kesadaran masyarakat dilakukan bekerja sama dengan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei - Badan Pusat Statistik.

Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan per aspek pengetahuan, sikap dan perilaku serta bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. Indeks Kesadaran Nasional diperoleh dari penjumlahan atas hasil perkalian indeks kesadaran setiap komoditi dengan bobot masing-masing komoditi.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu, yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

10. Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar

Kemandirian bahan baku OBA yaitu:

- 1) Bahan Baku OBA yang bermutu adalah bahan baku yang dihasilkan dari Industri Ekstrak Bahan Alam telah terstandar, baik proses produksi yang distandarisasi maupun bahan baku yang terstandar.
- 2) Industri Ekstrak Bahan Alam adalah Industri yang memproduksi bahan baku alam bentuk ekstrak, dimana bahan baku alam tersebut merupakan bahan baku/raw material bagi industri obat bahan alam, UMK, Industri Kosmetik dan Industri pangan. Proses produksi bahan baku alam dengan menerapkan CPOTB Tahun 2021.
- 3) Bahan Baku Obat Bahan Alam adalah bahan baku yang berasal dari tanaman dan hewan berupa ekstrak yang diproduksi oleh Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA).

Definisi tahapan pendampingan inovasi obat bahan alam:

- 1) Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (80%);
- 2) Pelaksanaan penelitian (15%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan (10%);
- 3) Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (5%); dan
- 4) Jika hasil sudah selesai atau jika dalam 3 bulan pendaftar tidak merespon surat Tambahan Data dianggap selesai (100%).

Cara Perhitungan: menghitung Rata-rata dari Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam, Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik obat bahan alam, suplemen kesehatan dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif, Persentase peningkatan penelitian uji pra klinik dan uji klinik Jamu yang didampingi sesuai standar, Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar, yaitu Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

11. Persentase UMK yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik

Ruang lingkup UMK mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); dan

- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik adalah UMKM yang memperoleh Sertifikat CPOTB Bertahap/ Sertifikat CPKB / SPA CPKB dan/ atau Nomor Izin Edar (NIE).

Cara Perhitungan : Jumlah UMKM yang memperoleh Sertifikat CPOTB Bertahap/ Sertifikat CPKB / SPA CPKB dan/ atau Nomor Izin Edar (NIE) dibagi jumlah UMKM OBA dan Kos yang didampingi dikali 100%.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik, yaitu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

12. Persentase Industri Kosmetik yang Mengikuti Program Maturitas yang dapat Menerapkan CPKB Secara Penuh

Industri kosmetik adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki bukti penerapan CPKB.

Program maturitas adalah program pembinaan/penilaian yang bertujuan mengarahkan industri kosmetik sehingga dapat menerapkan aspek CPKB secara penuh.

Cara perhitungan Jumlah industri yang berhasil menerapkan CPKB secara penuh setelah menerapkan program dibandingkan sebelum menerapkan program (masih menerapkan CPKB secara bertahap).

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh, yaitu Direktorat Pengawasan Kosmetik.

13. Persentase Industri Obat Bahan Alam yang Meningkat Maturitasnya dalam Penerapan CPOTB Terkini

Industri Obat Bahan Alam adalah Industri yang memproduksi OT, Suplemen keseahtan, Obat Kuasi yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri Obat Bahan Alam ini wajib menerapkan CPOTB secara penuh/full aspek sesuai pedoman CPOTB terkini yaitu PerBPOM 25 Tahun 2021 tentang Penerapan CPOTB.

Maturitas Industri Obat Bahan Alam perlu dinilai dan ditetapkan dengan tools penilaian maturitas yang mencakup Aspek Pemenuhan CPOTB (indeks cluster berdasarkan data mapping dan track record hasil pemeriksaan rutin CPOTB) dan Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi di Bidang Obat Bahan Alam (Track Record Keamanan, Mutu, Penandaan dan Penerapan Pharmacovigilance). Program maturitas ini bertujuan untuk mengelompokkan Industri Obat Bahan Alam ke dalam

level maturitas tertentu sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Industri dengan tingkat maturitas yang tinggi adalah industri telah menerapkan CPOTB secara paripurna dan patuh terhadap regulasi di bidang OTSK, kepada Industri yang seperti ini dapat dilakukan less inspection karena dinilai telah mampu menerapkan jaminan mutu dalam melakukan produksi obat bahan alam. Industri yang seperti ini dapat digunakan sebagai mitra Badan POM sebagai orang tua angkat UMKM, mitra dalam peningkatan kompetensi petugas Badan POM misal sebagai tempat PKL, mitra dalam pembuatan konten edukasi Badan POM, dan lain-lain.

Sebagai dampak adanya *less inspection* pada Industri dengan tingkat maturitas tinggi, maka *focused inspection* dapat dilakukan pada Industri dengan tingkat maturitas menengah dan rendah untuk mengarahkan pada peningkatan level maturitas.

Cara Perhitungan: Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya /Jumlah Seluruh Industri Obat Bahan Alam di Indonesia.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini, yaitu Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

14. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Cara Perhitungan:

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)

Kategori nilai:

- a) 0 - 1,00 F Gagal
- b) 1,01 - 1,50 E Sangat Buruk
- c) 1,51 - 2,00 D Buruk
- d) 2,01 - 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan)
- e) 2,51 - 3,00 C Cukup
- f) 3,01 - 3,50 B- Baik (Dengan Catatan)
- g) 3,51 - 4,00 B Baik

- h) 4,01 - 4,50 A- Sangat Baik
- i) 4,51 - 5,00 A Pelayanan Prima

15. Nilai Pembangunan ZI Deputi II BPOM

Nilai pembangunan zona integritas merupakan hasil dari implementasi pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Unit Organisasi.

Cara Perhitungan:

Nilai dari hasil evaluasi zona integritas Unit Organisasi yang dinilai oleh tim evaluator Zona Integritas BPOM.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai Pembangunan ZI Deputi II BPOM adalah Inspektorat Utama.

16. Nilai AKIP Deputi II BPOM

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan sistem penerapan manajemen kinerja Inspektorat Utama yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat penyesuaian komponen dan bobot penilaian dalam evaluasi SAKIP, serta adanya Surat Edaran Inspektur Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Pi.04.7.72.01.23.01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

Komponen:

- a) Perencanaan Kinerja (bobot 24)
- b) Pengukuran Kinerja (bobot 24)
- c) Pelaporan Kinerja (bobot 12)
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20)
- e) Capaian Kinerja (20)
- f) Sumber Data:
- g) Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Utama dari Tim Evaluator AKIP BPOM

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai AKIP Deputi II BPOM adalah Inspektorat Utama.

17. Nilai Kinerja Anggaran Deputi II BPOM

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Inspektorat Utama yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

1) Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Indikator pembentuk Nilai Evaluasi Anggaran sebagai berikut:

a) Efektivitas (75) dengan rincian:

- Capaian indikator kinerja program (IKP) dengan bobot 30;
- Agregasi capaian RO Satker dengan bobot 45;

b) Efisiensi (25) dengan rincian:

- Penggunaan SBK dengan bobot 10
- Efisiensi SBK dengan bobot 15
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

2) Pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA):

- a) Revisi DIPA (10%);
- b) Deviasi Hal III DIPA (15%);
- c) Penyerapan Anggaran (20%);
- d) Belanja kontraktual (10%);
- e) Penyelesaian Tagihan (10%);
- f) Pengelolaan UP dan TUP (10%);
- g) Capaian Output (25%);

Cara Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Deputi II BPOM, yaitu:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Keterangan:

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Deputi II BPOM adalah Kementerian Keuangan.

18. Indeks Manajemen Risiko Deputi II BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan,
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko, dan
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

Cara Perhitungan:

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas:

$$\text{Skor Maturitas} = (\text{Skor Total})/16$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko.
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan evaluasi oleh Inspektorat Utama.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Indeks Manajemen Risiko Deputi II BPOM adalah Inpektorat Utama.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-

masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Capaian} = 1 + (1 - \text{Realisasi}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 6 : Kriteria Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	$> 110\%$	
Sangat Baik	$100\% \leq x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x < 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$< 60\%$	

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- (1) Jika capaian kinerja setiap indikator $> 110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- (2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 : Kriteria Predikat Nilai Kerja Organisasi

Predikat NKO	Nikai Kerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad IE \geq 100\% = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No.	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	$0 - 0,20$	100% (efisien)
3	$0,21 - 0,40$	95% (efisien)
4	$0,41 - 0,60$	92% (efisien)
5	$0,61 - 0,80$	90% (efisien)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Triwulan II Tahun 2025

6	0,81 – 1,00	88% (efisien)
7	1,01 – 1,20	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,40	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,60	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,80	78% (tidak efisien)
11	> 1,81	75% (tidak efisien)

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB

III

**Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2025**

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini, diuraikan mengenai hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Deputi II BPOM selama Triwulan II Tahun 2025. Evaluasi kinerja difokuskan pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, serta realisasi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Analisis dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi capaian pada Triwulan II, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Selain itu, pada bab ini juga disajikan evaluasi atas realisasi penggunaan anggaran Deputi II BPOM, untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja dalam kerangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Evaluasi kinerja dan anggaran ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi tindak lanjut dan strategi perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya, dalam rangka memastikan tercapainya sasaran strategis Deputi II BPOM Tahun 2025 secara optimal.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan realisasi kinerja pada Triwulan II tahun 2025, yang capaian kinerjanya diukur dengan menggunakan 6 Sasaran Program dan 25 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), Deputi II BPOM mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar sebesar 92,29 masuk dalam predikat Baik. Rincian capaian kinerja dari tiap Indikator kinerja pada TW III 2025 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 8 : Nilai Kinerja Organisasi TW II tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00%	65,73%	101,12%	101,12%
2		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00%	83,25%	122,43%	110,00%
3		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00%	73,71%	118,88%	110,00%
4		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00%	84,16%	101,40%	101,40%
5		Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86,00%	78,43%	91,20%	91,20%
		Persentase sarana produksi suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan	85,00%	72,73%	85,56%	85,56%
6		Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81,00%	67,55%	83,40%	83,40%
7		Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,00%	78,08%	111,54%	110,00%
8		Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89,00%	94,94%	106,67%	106,67%
9		Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,00%	68,13%	87,35%	87,35%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Percentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	41,50%	45,15%	108,80%	108,80%
11		Percentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	3,00	3,11	103,67%	103,67%
Total Capaian PK						1199,16
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)						99,93
Predikat NKO						Baik

Tabel 9 : Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025

No.	Sasaran Program / Indikator Kinerja	Target (%) / Nilai)	Realisasi (%) / Nilai)	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
SP 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			102,02	Sangat baik
IKSP 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00	65,73	101,12	Sangat baik
IKSP 2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00	83,25	122,43	Tidak dapat disimpulkan
IKSP 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00	73,71	118,89	Tidak dapat disimpulkan
IKSP 4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	
IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00	84,16	101,40	Sangat baik
IKSP 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86,00	78,43	91,20	Baik
IKSP 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85,00	72,73	85,56	Cukup
IKSP 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81,00	67,55	83,40	Cukup
IKSP 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,00	78,08	111,54	Tidak dapat disimpulkan
IKSP 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89,00	94,94	106,67	Sangat baik
IKSP 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,00	68,13	87,35	Cukup
IKSP 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78,00	69,18	88,69	Cukup
IKSP 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87,00	82,77	95,14	Baik
IKSP 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71,00	60,52	85,24	Cukup
SP 2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			n/a	
IKSP 15	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	n/a	n/a	n/a	
SP 3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu			n/a	

No.	Sasaran Program / Indikator Kinerja	Target (%) / Nilai)	Realisasi (%) / Nilai)	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
IKSP 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	n/a	n/a	n/a	
SP 4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			106,23	Sangat baik
IKSP 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	41,50	45,15	108,80	Sangat baik
IKSP 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	3,00	3,11	103,67	Sangat baik
IKSP 19	Persentase Industri Kosmetik yang mengikti program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	n/a	n/a	n/a	
IKSP 20	Persentase Industri Obat Bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	n/a	n/a	n/a	
SP 5	Layanan Publik BPOM yang Prima			n/a	
IKSP 21	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	n/a	n/a	n/a	
SP 6	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal			n/a	
IKSP 22	Nilai Pembangunan Zi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	
IKSP 23	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	
IKSP 24	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	
IKSP 25	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	

Pada TW II 2025, dari 25 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), terdapat 15 Indikator yang telah dapat diukur realisasi kinerjanya, dengan hasil 3 (tiga) indikator dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, 5 (lima) indikator dengan kriteria sangat baik, 2 (dua) indikator dengan kriteria baik, dan 5 (lima) indikator dengan kriteria cukup. Sementara 10 indikator lainnya, belum dilakukan pengukuran pada Triwulan ini. Berikut adalah analisis capaian kinerja dari tiap indikator:

1. Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu

Salah satu indikator utama dalam pengukuran efektivitas pengawasan Deputi II BPOM adalah Persentase Obat Bahan Alam (OBA) yang Aman dan Bermutu. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan produk OBA terhadap ketentuan regulasi serta efektivitas sistem pengawasan post-market yang diterapkan. Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan hasil sampling terhadap produk OBA yang beredar di pasaran, kemudian dievaluasi berdasarkan lima kriteria mutu dan keamanan yang telah ditetapkan. Berikut capaian kinerjanya di Triwulan II tahun 2025:

Tabel 10 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target Triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65.00%	65,73%	101,12%	Sangat Baik

Target Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu pada TW II 2025 adalah sebesar 65,00% dengan realisasi sebesar 65,73%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 101,12%, masuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 11 : Perbandingan Kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya

IKU	Capaian TW I	Capaian TW II	Perbandingan
Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	104,34%	101,12%	Lebih Rendah

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja di triwulan II lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja di triwulan I.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 12 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65,00%	65,73%	101,12%	Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 101,12%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai bahkan melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator “Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu” menunjukkan capaian yang positif, yakni 65,73% dari target triwulan sebesar 65%, atau setara dengan 101,12% capaian kinerja. Secara kumulatif terhadap target tahunan yang juga sebesar 65%, indikator ini sudah menunjukkan pencapaian lebih dari 100%, yang berarti bahwa hasil pengawasan telah melampaui ekspektasi hingga pertengahan tahun.

Keberhasilan ini dicapai melalui beberapa intervensi strategis, khususnya dalam hal intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Intervensi tersebut mencakup:

- Koordinasi dan penguatan peran UPT dalam pelaksanaan sampling dan pengujian produk obat bahan alam.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan di daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan data dan respons pengawasan.
- Pemanfaatan hasil pengujian laboratorium yang lebih komprehensif dan tepat waktu dalam menetapkan status keamanan dan mutu produk.

Selain itu, pencapaian indikator ini juga didukung oleh peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi regulasi yang berlaku, serta adanya edukasi yang berkelanjutan dari BPOM terhadap pelaku usaha terkait pentingnya memenuhi aspek keamanan, mutu, dan penandaan produk.

Secara umum, indikator ini telah menunjukkan arah positif dalam memastikan bahwa obat bahan alam yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Keberhasilan ini menjadi salah satu modal penting untuk mendorong capaian indikator-indikator kinerja lainnya yang berkaitan langsung dengan pengawasan pre- dan post-market produk obat bahan alam di Indonesia.

Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan

Untuk mendukung pencapaian indikator Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu, Deputi II BPOM telah melakukan serangkaian intervensi yang menyasar baik pada aspek pelaksanaan pengawasan maupun tindak lanjut terhadap temuan produk Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

a. Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan obat bahan alam (OBA):

- Monitoring pelaksanaan pengawasan oleh UPT dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan sampling dan penandaan produk. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 dan 16 Juni 2025, dan mencakup evaluasi lapangan terhadap kesesuaian prosedur.
- Penyampaian Nota Dinas dari Direktur Pengawasan OTSK kepada P3OMN sebagai tindak lanjut hasil evaluasi atas pengujian laboratorium yang dilakukan oleh UPT, sebagai bentuk penguatan koordinasi antarunit teknis.
- Pelatihan penyusunan sampling plan kepada UPT dan pelaku usaha pada tanggal 23 Juni 2025, dengan tujuan meningkatkan pemahaman teknis dalam pelaksanaan sampling yang berbasis risiko dan menjamin mutu produk OBA.

b. Intervensi terhadap tindak lanjut temuan produk OBA yang TMS:

- Penyelenggaraan desk konsultasi kepada pelaku usaha terkait penandaan dan iklan yang tidak sesuai pada tanggal 9 Mei dan 17 Juni 2025, serta pada 16 Juni 2025 untuk menindaklanjuti hasil pengujian yang menunjukkan ketidaksesuaian.
- Pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha (FONDASI) pada tanggal 9 Mei 2025, sebagai wadah dialog dan penyampaian informasi hasil pengawasan sekaligus edukasi terhadap kewajiban regulasi.
- Inspeksi terhadap sarana produksi dan distribusi untuk melakukan penelusuran terhadap produk dengan dugaan pemalsuan penandaan, yang dilaksanakan di tiga sarana berbeda.
- Bimbingan teknis identifikasi akar masalah (root cause analysis) dan penyusunan tindakan korektif dan preventif (Corrective and Preventive Action/CAPA) kepada pelaku usaha sebagai bagian dari penguatan sistem jaminan mutu internal mereka.

Dengan pencapaian ini, Deputi II BPOM akan terus mengintensifkan upaya pengawasan, melakukan perbaikan sistem pemantauan mutu, serta memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mempertahankan dan meningkatkan persentase produk OBA yang memenuhi syarat keamanan dan mutu di triwulan berikutnya.

2. Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu

Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengawasan produk post-market oleh Deputi II BPOM, khususnya dalam menjamin kualitas dan keamanan suplemen kesehatan yang beredar di masyarakat.

Indikator ini diukur berdasarkan hasil sampling produk suplemen kesehatan dari sarana distribusi dan penjualan, yang kemudian dinilai berdasarkan lima kriteria kelayakan mutu dan keamanan. Berikut capaian kinerjanya di Triwulan II tahun 2025:

Tabel 13 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00%	83,25%	122,43%	Tidak Dapat Disimpulkan

Target Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu pada TW II 2025 adalah sebesar 68,00% dengan realisasi sebesar 83,25%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 122,43%, masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan.

Perbandingan kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 14 : Perbandingan Kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya

IKU	Capaian TW I	Capaian TW II	Perbandingan
Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	128,68%	122,43%	Lebih Rendah

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja di triwulan II lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja di triwulan I.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 15 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68,00%	83,25%	122,43%	Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 122,43%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai bahkan melampaui.

Analisis Capaian Kinerja dan Penyebab Keberhasilan pada Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu

Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu menunjukkan angka realisasi yang melebihi target, yaitu sebesar 83,25% dari target 68,00%, dengan capaian kinerja 122,43%. Namun demikian, berdasarkan ketentuan dalam pedoman evaluasi kinerja, indikator ini dikategorikan "tidak dapat disimpulkan". Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor teknis yang mempengaruhi validitas data capaian hingga akhir Triwulan II.

Sampai dengan akhir Juni 2025, jumlah sampel yang telah dilakukan pengujian baru mencapai 32,75% atau sebanyak 770 sampel, dari total keseluruhan yang direncanakan. Masih banyak sampel yang belum dilakukan pengujian laboratorium, sehingga nilai capaian belum mencerminkan kondisi keseluruhan secara utuh dan representatif. Selain itu, terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang realisasi pengujiannya masih berada di bawah 30% dari jumlah sampel yang telah disampling. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sampling oleh beberapa UPT, serta keterlambatan pengujian, turut memengaruhi hasil capaian yang terlihat tinggi.

Perubahan metode sampling dari sebelumnya menggunakan kombinasi acak (70%) dan targeted (30%) menjadi targeted 100% juga memerlukan waktu adaptasi. Perubahan ini menuntut pemahaman teknis dan ketepatan dalam menetapkan sampel yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Namun karena belum semua petugas UPT sepenuhnya memahami pendekatan ini, maka belum optimal dalam mengidentifikasi sampel risiko tinggi, yang justru berdampak pada rendahnya temuan TMS dan menghasilkan capaian tinggi namun kurang valid.

Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan:

1. Monitoring pelaksanaan pengawasan suplemen kesehatan oleh UPT, termasuk kesesuaian penandaan dan pelaksanaan sampling, dilakukan pada 28 April dan 16 Juni 2025.
2. Penyampaian Nota Dinas Direktur Pengawasan OTSK kepada P3OMN untuk menindaklanjuti evaluasi atas hasil pengujian UPT.
3. Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bersama Direktorat Standardisasi OTSKKos, P3OMN, dan Ditreg OTSKKos mengenai

pengembangan Metode Analisis (MA) produk suplemen kesehatan berbahan tunggal.

Intervensi terhadap tindak lanjut temuan TMS:

1. Desk konsultasi dengan pelaku usaha pada 9 Mei dan 17 Juni 2025, membahas tindak lanjut temuan terkait penandaan yang tidak sesuai.
2. Forum Komunikasi FONDASI dengan pelaku usaha pada 9 Mei 2025 untuk memperkuat pemahaman terhadap ketentuan mutu dan keamanan suplemen kesehatan.

Secara umum, keberhasilan capaian angka realisasi ini menunjukkan adanya perbaikan mutu produk yang beredar, namun juga mencerminkan perlunya peningkatan akurasi dan validitas data capaian melalui optimalisasi metode sampling dan pelatihan petugas. Deputi II BPOM akan melanjutkan upaya penguatan kapasitas petugas UPT serta mendorong percepatan pengujian laboratorium untuk memastikan validitas data capaian indikator pada periode berikutnya.

3. Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu

Indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana produk kosmetik yang beredar di pasar memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku terkait keamanan dan mutu produk, serta sejauh mana pelaksanaan pengawasan telah berhasil mengurangi peredaran produk yang tidak memenuhi syarat. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil sampling targeted/purposive, sesuai dengan Pedoman Sampling Kosmetik yang berlaku pada tahun berjalan. Berikut capaian kinerjanya di Triwulan II tahun 2025:

Tabel 16 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap target Triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00%	73,71%	118,89%	Tidak Dapat Disimpulkan

Target pada TW II 2025 adalah sebesar 62,00% dengan realisasi sebesar 73,71%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 118,89%, masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan.

Perbandingan kinerja Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 17 : Perbandingan Kinerja Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya

IKU	Capaian TW I	Capaian TW II	Perbandingan
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	144,71%	118,89%	Lebih Rendah

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja di triwulan II lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja di triwulan I.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 18 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62,00%	73,71%	118,89%	Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 118,89%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai bahkan melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian indikator Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari target sebesar 62,00%, realisasi yang dicapai mencapai 73,71%, atau 118,89% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas produk kosmetik yang diuji telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa faktor strategis yang mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan, antara lain:

1. Peningkatan efektivitas strategi sampling targeted (purposive) Penggunaan metode sampling terarah yang berbasis risiko telah memungkinkan petugas pengawas untuk lebih fokus terhadap produk dan sarana yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Hal ini memperbesar peluang mendekripsi pelanggaran dan meningkatkan efisiensi pengawasan.
2. Koordinasi yang erat dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Deputi II BPOM secara konsisten melakukan monitoring dan pendampingan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh UPT, termasuk evaluasi terhadap proses sampling dan pengujian laboratorium. Hal ini memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan secara tepat dan sesuai prosedur.

3. Pemanfaatan data historis dan hasil pengawasan sebelumnya Pelaksanaan pengawasan kosmetik mengacu pada pemetaan risiko berbasis data sebelumnya, termasuk pelaku usaha yang pernah memiliki riwayat pelanggaran, jenis produk tertentu yang rawan TMS, dan wilayah distribusi yang berisiko.
4. Peningkatan kapasitas petugas pengawas dan fasilitasi teknis Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan teknis sampling dan pengujian, serta bimbingan teknis (bimtek), turut menunjang akurasi pengambilan sampel dan validitas hasil pengujian kosmetik.
5. Kolaborasi dengan pelaku usaha dalam upaya perbaikan mutu produk Kegiatan pembinaan dan konsultasi yang intensif kepada pelaku usaha, termasuk desk konsultasi dan kegiatan edukatif lainnya, berkontribusi pada meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan dan mutu produk kosmetik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, Deputi II BPOM akan terus melakukan pemantauan berkelanjut

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

Dalam upaya mencapai target indikator *Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu* pada Triwulan II Tahun 2025, Deputi II BPOM telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang berfokus pada peningkatan efektivitas pengawasan, khususnya dalam aspek sampling, pengujian, dan pengendalian mutu penandaan. Beberapa intervensi penting yang telah dilakukan antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sampling dan Pengujian oleh UPT Deputi II BPOM melakukan monitoring dan evaluasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait perencanaan serta pelaksanaan sampling dan pengujian kosmetik Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2025 dan bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan pedoman yang berlaku serta meningkatkan akurasi dan akuntabilitas proses sampling.
2. Pembatalan Surat Edaran terkait Kategorisasi Temuan Penandaan Sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan pengawasan di lapangan, Deputi II BPOM melakukan pembatalan terhadap surat edaran sebelumnya yang mengatur tentang kategorisasi temuan penandaan menjadi minor dan mayor. Dampak dari pembatalan tersebut adalah meningkatnya jumlah produk yang dikategorikan sebagai Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) penandaan, yang pada gilirannya mendorong pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam memenuhi persyaratan penandaan kosmetik sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penandaan Kosmetik Deputi II juga menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan penandaan kosmetik periode Januari hingga April 2025, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025. Kegiatan ini memberikan umpan balik kepada UPT serta memperkuat sinergi antarunit dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi penandaan produk kosmetik.

Ketiga kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendekatan komprehensif yang diterapkan oleh Deputi II BPOM dalam memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak hanya memenuhi aspek legalitas, namun juga aman dan bermutu bagi konsumen. Strategi berbasis risiko, evaluasi kinerja pelaksanaan di lapangan, dan penyempurnaan regulasi menjadi fondasi utama dalam pencapaian indikator ini.

4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan OBA, SK, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor merupakan indikator yang mencerminkan efektivitas koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Badan POM. Semakin tinggi capaian indikator ini, semakin baik keterlibatan dan komitmen lintas sektor dalam mendukung pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Berikut capaian kinerjanya di Triwulan II tahun 2025:

Tabel 19 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor terhadap target Triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00%	84,16%	101,40%	Sangat Baik

Target pada TW II 2025 adalah sebesar 83,00% dengan realisasi sebesar 84,16%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 101,40%, masuk dalam kategori sangat baik.

Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 20 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya

IKU	Capaian TW I	Capaian TW II	Perbandingan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	92,67%	101,40%	Lebih Besar

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja di triwulan II lebih besar bila dibandingkan dengan capaian kinerja di triwulan I.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 21 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,00%	84,16%	101,40%	Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 101,40%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai bahkan melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor mencapai nilai realisasi sebesar 84,16% dari target 83,00%, atau capaian kinerja sebesar 101,40%, sehingga masuk dalam kategori sangat baik,

Keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, khususnya terkait produk yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:

- Penguatan komunikasi lintas sektor, baik melalui surat rekomendasi hasil pengawasan yang lebih sistematis dan komprehensif, maupun koordinasi langsung antara BPOM dengan instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan pemerintah daerah.
- Peningkatan kualitas laporan hasil pengawasan yang dilengkapi dengan data pendukung dan urgensi temuan, sehingga memudahkan instansi penerima rekomendasi untuk melakukan tindak lanjut secara cepat dan tepat.
- Pengawalan aktif dari unit pengawasan di Deputi II BPOM terhadap proses tindak lanjut, termasuk melalui pemantauan progres dan permintaan bukti pelaksanaan rekomendasi.

Peningkatan tingkat respons dan keterlibatan lintas sektor menunjukkan bahwa strategi advokasi dan pendekatan kolaboratif yang diterapkan oleh Deputi II BPOM telah berjalan efektif. Ke depan, tantangan yang perlu diantisipasi adalah menjaga konsistensi tindak lanjut dari lintas sektor, serta memperkuat pemahaman bersama akan urgensi

pengawasan keamanan dan mutu produk obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik.

5. Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu ukuran efektivitas pengawasan Deputi II BPOM terhadap fasilitas produksi OBA dalam memenuhi persyaratan teknis dan regulasi yang ditetapkan, termasuk penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Indikator ini menjadi penting karena secara langsung berkaitan dengan jaminan mutu dan keamanan produk OBA yang dikonsumsi masyarakat. Berikut capaian kinerjanya di Triwulan II tahun 2025:

Tabel 22 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86,00%	78,43%	91,20%	Baik

Target pada TW II 2025 adalah sebesar 86,00% dengan realisasi sebesar 78,43%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 91,20%, masuk dalam kategori baik.

Perbandingan kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 23 : Perbandingan Kinerja Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya

IKU	Capaian TW I	Capaian TW II	Perbandingan
Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	72,67%	91,20%	Lebih Besar

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja di triwulan II lebih besar bila dibandingkan dengan capaian kinerja di triwulan I.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 24 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86,00%	78,43%	91,20%	Akan tercapai

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 91,20%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator *Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan* menunjukkan realisasi sebesar 78,43% dari target 86,00%, dengan capaian kinerja 91,20%, yang dikategorikan sebagai Baik meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan.

Adanya deviasi dari target disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Dominasi temuan ketidaksesuaian terhadap penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sejumlah sarana produksi OBA masih belum konsisten dalam menerapkan seluruh aspek CPOTB, terutama terkait dokumentasi, higiene sanitasi, dan validasi proses.
- Keterbatasan dalam pelaksanaan tindak lanjut oleh UPT. Beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum optimal dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan pedoman yang berlaku, sehingga perbaikan di sarana produksi tidak berjalan cepat dan sistematis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Deputi II BPOM telah melakukan berbagai intervensi strategis sebagai bentuk penguatan pengawasan dan peningkatan kapasitas, antara lain:

1. Forum Koordinasi Inspektur CPOTB dan OTSK di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan menyamakan persepsi dan meningkatkan kapabilitas pengawasan di tingkat UPT.
2. Desk penyesuaian target UPT BPOM dalam merespons kebijakan efisiensi anggaran, sehingga sasaran pengawasan tetap dapat tercapai secara efektif dengan sumber daya terbatas.
3. In-house training Inspektur OBASK pada tanggal 19–20 Juni 2025, yang bertujuan meningkatkan kompetensi teknis para inspektur dalam menilai kesesuaian sarana produksi berdasarkan standar CPOTB terbaru.

Melalui langkah-langkah ini, Deputi II BPOM berupaya memperkuat integritas sistem pengawasan dan mempercepat peningkatan kualitas fasilitas produksi obat bahan alam

secara nasional. Strategi lanjutan akan difokuskan pada pembinaan sarana dengan risiko tinggi serta pendampingan teknis intensif agar capaian indikator ini dapat memenuhi target pada triwulan berikutnya.

6. Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan fasilitas produksi suplemen kesehatan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk penerapan Cara Pembuatan Produk yang Baik (CPPKB). Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana pelaku usaha telah memenuhi ketentuan teknis produksi, seperti kesesuaian sarana dan prasarana, dokumentasi mutu, serta pengendalian proses produksi. Berikut capaian kinerjanya di Triwulan II tahun 2025:

Tabel 25 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85,00%	72,73%	85,56%	Cukup

Target pada TW II 2025 adalah sebesar 85,00% dengan realisasi sebesar 72,73%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 85,56%, masuk dalam kategori cukup. Realisasi kinerja di TW II ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya. Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 26 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85,00%	72,73%	85,56%	Akan Tercapai

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 85,56%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Capaian indikator *Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan* pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai **72,73%** dari target yang ditetapkan sebesar **85,00%**, dengan capaian kinerja sebesar **85,56%** dan dikategorikan dalam kriteria “Cukup.”

Ketidaktercapaian target ini terutama disebabkan oleh **rendahnya proporsi fasilitas produksi yang memenuhi ketentuan**. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah sarana produksi, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang belum mampu memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara menyeluruh. Keterbatasan sumber daya, sarana produksi yang belum memadai, serta pemahaman teknis yang belum optimal menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan ini.

Sebagai upaya tindak lanjut, Deputi II BPOM melalui UPT telah mendorong dilakukannya **pembinaan secara aktif kepada pelaku usaha**, khususnya terhadap fasilitas produksi yang produknya berdasarkan hasil pengujian tidak memenuhi syarat. Diharapkan kegiatan pembinaan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip CPOTB.

Sejumlah intervensi strategis yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini antara lain:

1. Forum Koordinasi Inspektur CPOTB dan OTSK UPT BPOM di seluruh wilayah Indonesia, sebagai wadah sinkronisasi kebijakan dan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan.
2. Desk penyesuaian target UPT BPOM sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran, dengan tetap mengutamakan pengawasan pada sarana yang berisiko tinggi.
3. In-house training Inspektur OBASK (Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) pada 19–20 Juni 2025 untuk meningkatkan kompetensi teknis inspektur dalam menilai dan membina sarana produksi sesuai standar CPOTB.

Dengan strategi tersebut, Deputi II BPOM berharap pada triwulan berikutnya terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah sarana produksi suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan. Pendekatan pembinaan yang lebih masif, disertai pengawasan yang lebih terfokus pada sarana prioritas, akan menjadi kunci peningkatan capaian indikator ini.

7. Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri kosmetik dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Berikut capaian kinerjanya di Triwulan II tahun 2025:

Tabel 27 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81,00%	67,55%	83,40%	Cukup

Target pada TW II 2025 adalah sebesar 81,00% dengan realisasi sebesar 67,55%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 83,40%, masuk dalam kategori cukup.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 28 : Perbandingan Kinerja Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya

IKU	Capaian TW I	Capaian TW II	Perbandingan
Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	79,37%	83,40%	Lebih Besar

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja di triwulan II lebih besar bila dibandingkan dengan capaian kinerja di triwulan I.

Tabel 29 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81,00%	67,55%	83,40%	Akan tercapai

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 83,40%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian indikator *Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan* adalah sebesar 67,55% dari target yang ditetapkan sebesar 81,00%, dengan capaian kinerja mencapai 83,40% dan masuk dalam kriteria “Cukup.”

Meskipun belum mencapai target, capaian ini mencerminkan adanya progres pelaksanaan pengawasan sarana produksi kosmetik, namun masih terdapat beberapa tantangan yang menghambat pemenuhan target. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Masih adanya sarana produksi yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kurangnya kesiapan fasilitas produksi, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, dalam memenuhi standar teknis dan administratif.
- Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan oleh UPT, yang menyebabkan proses pembinaan dan perbaikan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Untuk mendukung pencapaian indikator ini, Deputi II BPOM telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kepada UPT terkait target pemeriksaan sarana produksi dan distribusi kosmetik oleh UPT BPOM Tahun 2025 pada tanggal 28 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pengawasan oleh UPT dengan target-target pengawasan yang telah ditetapkan.
- Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh UPT dalam pelaksanaan pengawasan sarana produksi kosmetik.
- Memberikan pembinaan teknis terhadap strategi pengawasan, termasuk mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan.

Melalui kegiatan ini diharapkan UPT dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempercepat proses pembinaan kepada sarana produksi yang belum memenuhi ketentuan. Deputi II BPOM akan terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mendorong peningkatan kualitas sarana produksi kosmetik di Indonesia.

8. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan Deputi II BPOM terhadap rantai distribusi produk OBA. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan fasilitas distribusi terhadap persyaratan teknis, administratif, dan kualitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk aspek penyimpanan, pengangkutan, pencatatan, dan dokumentasi distribusi. Berikut capaian kinerjanya di Triwulan II tahun 2025:

Tabel 30 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,00%	78,08%	111,54%	Tidak dapat disimpulkan

Target pada TW II 2025 adalah sebesar 70,00% dengan realisasi sebesar 78,08%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 111,54%, masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan.

Perbandingan Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 31 : Perbandingan Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan di triwulan Sebelumnya

IKU	Capaian TW I	Capaian TW II	Perbandingan
Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	115,86%	111,54%	Lebih Rendah

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja di triwulan II lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja di triwulan I.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 32 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70,00%	78,08%	111,54%	Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 111,54%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai bahkan melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian indikator *Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan* menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu 78,08% dari target 70,00%, dengan capaian kinerja sebesar 111,54%.

Namun, meskipun nilai capaian telah melampaui target dan termasuk dalam kategori “sangat baik”, analisis mendalam menunjukkan bahwa indikator ini belum dapat disimpulkan secara representatif. Hal ini dikarenakan jumlah sarana distribusi yang telah selesai diawasi baru mencapai 33,75% atau 619 sarana dari total 1.834 sarana yang direncanakan. Rendahnya jumlah realisasi ini disebabkan oleh adanya penyesuaian target pemeriksaan akibat pengembalian target ke DIPA awal, sehingga diperlukan penyesuaian ulang oleh seluruh UPT BPOM di Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut dan tetap menjaga kualitas pelaksanaan pengawasan, Deputi II BPOM telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain:

1. Melaksanakan Forum Koordinasi Inspektur CPOTB dan OTSK UPT BPOM di seluruh wilayah Indonesia, sebagai sarana penyamaan persepsi teknis pengawasan serta konsolidasi implementasi kebijakan.
2. Melakukan desk penyesuaian target kepada seluruh UPT BPOM sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan di lapangan.
3. Menyelenggarakan Inhouse Training bagi Inspektur OBASK pada tanggal 19–20 Juni 2025 guna meningkatkan kompetensi teknis SDM pengawasan dalam melakukan inspeksi terhadap sarana distribusi OBA.

Dengan langkah-langkah tersebut, Deputi II BPOM tetap mampu menjaga kualitas hasil pengawasan terhadap fasilitas distribusi OBA, meskipun dalam kondisi pelaksanaan yang belum optimal secara kuantitatif. Ke depan, percepatan pemenuhan target pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan akan terus diupayakan agar hasil pengawasan lebih representatif dan akurat dalam menggambarkan kondisi distribusi OBA di Indonesia.

9. Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas pengawasan post-market Deputi II BPOM, khususnya dalam memastikan bahwa proses distribusi produk suplemen kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha distribusi terhadap aspek legalitas, pencatatan, sistem penyimpanan, pelacakan produk, dan pemenuhan standar fasilitas distribusi. Berikut capaian kinerjanya di Triwulan II tahun 2025:

Tabel 33 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89,00%	94,94%	106,67%	Sangat Baik

Target pada TW II 2025 adalah sebesar 89,00% dengan realisasi sebesar 94,94%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 106,67%, masuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan kinerja Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 34 : Perbandingan Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan di triwulan Sebelumnya

IKU	Capaian TW I	Capaian TW II	Perbandingan
Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	109,55%	106,67%	Lebih Rendah

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja di triwulan II lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja di triwulan I.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 35 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89,00%	94,94%	106,67%	Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 106,67%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai bahkan melampaui.

Analisis penyebab keberhasilan

Capaian indikator *Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan* pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 94,94% dari target 89,00%, sehingga capaian kinerja tercatat mencapai 106,67%.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan strategi pengawasan yang terencana dan responsif. Salah satu faktor utama pencapaian ini adalah pelaksanaan pembinaan yang tepat sasaran terhadap pelaku usaha, terutama dalam menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian di lapangan. Selain itu, perencanaan pengawasan oleh UPT yang dilakukan secara sistematis dan berbasis risiko juga memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan fasilitas distribusi terhadap ketentuan yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan strategis yang telah mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

1. Forum Koordinasi Inspektur CPOTB dan OTSK UPT BPOM di seluruh wilayah Indonesia, yang memperkuat sinergi pengawasan lintas UPT serta mendorong keselarasan pemahaman terhadap penerapan standar distribusi suplemen kesehatan.
2. Pelaksanaan desk penyesuaian target pengawasan oleh UPT BPOM, sebagai bentuk adaptasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pengawasan.
3. Inhouse Training Inspektur OBASK pada tanggal 19–20 Juni 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis petugas dalam melakukan inspeksi terhadap sarana distribusi.

Pencapaian ini tidak hanya menjadi indikator kinerja semata, tetapi juga mencerminkan hasil nyata dari pendekatan pengawasan yang kolaboratif dan edukatif. Ke depan, konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui program pembinaan yang berkelanjutan akan menjadi kunci utama dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian kinerja ini secara nasional.

10. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan Deputi II BPOM terhadap kepatuhan sarana distribusi kosmetik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mencakup pemenuhan aspek legalitas, sistem penyimpanan yang sesuai, ketertelusuran produk, pencatatan distribusi, serta kelayakan fasilitas fisik dan manajemen mutu distribusi kosmetik. Berikut capaian kinerjanya di Triwulan II tahun 2025:

Tabel 36 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,00%	68,13%	87,35%	Cukup

Target pada TW II 2025 adalah sebesar 78,00% dengan realisasi sebesar 68,13%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 87,35%, masuk dalam kategori cukup.

Perbandingan kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 37 : Perbandingan Kinerja Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya

IKU	Capaian TW I	Capaian TW II	Perbandingan
Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	76,92%	87,35%	Lebih Besar

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja di triwulan II lebih besar bila dibandingkan dengan capaian kinerja di triwulan I.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 38 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78,00%	68,13%	87,35%	Akan Tercapai

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 87,35%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Indikator *Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan* pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 68,13% dari target 78,00%, atau setara dengan 87,35% capaian kinerja. Berdasarkan pedoman penilaian kinerja, capaian ini dikategorikan sebagai “cukup”, meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor menjadi penyebab belum tercapainya target indikator ini. Pertama, pertumbuhan jumlah pelaku usaha kosmetik yang cukup signifikan belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai terkait regulasi distribusi kosmetik. Banyak pelaku usaha baru yang belum sepenuhnya memahami standar distribusi yang ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan praktik distribusi yang baik.

Kedua, pada bulan Februari 2025 dilakukan kegiatan intensifikasi pengawasan terhadap sarana distribusi kosmetik, yang memperluas cakupan pengawasan dan secara khusus menyasar sarana dengan potensi risiko tinggi. Langkah ini secara strategis bertujuan untuk memperkuat pengendalian terhadap rantai distribusi kosmetik, namun di sisi lain berdampak pada penurunan persentase sarana yang memenuhi ketentuan karena banyaknya temuan pada sarana berisiko.

Sebagai bentuk penguatan pelaksanaan pengawasan, telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kepada UPT BPOM terkait target pemeriksaan sarana produksi dan distribusi kosmetik, yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman pelaksanaan pengawasan di seluruh wilayah, serta memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan tetap berjalan secara optimal meskipun menghadapi dinamika pertumbuhan pelaku usaha.

Ke depan, strategi peningkatan kinerja akan difokuskan pada penguatan pembinaan kepada pelaku usaha, penyusunan pedoman teknis yang lebih praktis dan adaptif, serta penguatan kapasitas petugas UPT dalam melakukan pendampingan regulasi kepada pelaku usaha kosmetik, guna mendorong peningkatan kepatuhan dan pencapaian target yang lebih optimal.

11. Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan produk OBA yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap iklan OBA bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat objektif, tidak menyesatkan, dan tidak mengandung klaim berlebihan yang dapat membahayakan konsumen atau menurunkan kepercayaan terhadap produk legal. Berikut capaian kinerjanya di Triwulan II tahun 2025:

Tabel 39 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78,00%	69,18%	88,69%	Cukup

Target pada TW II 2025 adalah sebesar 78,00% dengan realisasi sebesar 69,18%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 88,69% masuk dalam kategori cukup.

Perbandingan kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 40 : Perbandingan Kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya

IKU	Capaian TW I	Capaian TW II	Perbandingan
Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	96,12%	88,69%	Lebih Rendah

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja di triwulan II lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja di triwulan I.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 41 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78,00%	69,18%	88,69%	Akan Tercapai

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 88,69%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian indikator Persentase Iklan Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan mencapai 69,18% dari target 78,00%, dengan capaian kinerja sebesar 88,69% yang dikategorikan sebagai “cukup”. Meskipun capaian ini menunjukkan adanya pelaksanaan pengawasan dan intervensi yang signifikan, namun indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu penyebab utama ketidaktercapaian target ini adalah pembatalan Surat Edaran Deputi terkait kategorisasi temuan iklan minor dan mayor. Sebelum pembatalan, pelanggaran iklan dengan kategori minor masih dinilai sebagai “memenuhi ketentuan”. Namun, dengan dihapusnya kategorisasi tersebut, maka semua bentuk pelanggaran iklan—baik minor maupun mayor—dianggap sebagai “tidak memenuhi ketentuan (TMK)”. Perubahan kebijakan ini menyebabkan peningkatan signifikan pada jumlah iklan yang diklasifikasikan sebagai TMK, yang berdampak langsung terhadap penurunan capaian indikator.

Menindaklanjuti perubahan kebijakan tersebut, telah dilakukan redefinisi operasional indikator serta analisis dan penetapan ulang target untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Penyesuaian ini menjadi langkah strategis dalam memastikan akurasi pelaporan dan efektivitas pengawasan.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator ini. Dalam rangka intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan, dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) UPT pada tanggal 28 April 2025 untuk menyelaraskan pemahaman dan pelaksanaan pengawasan iklan di seluruh wilayah kerja. Sedangkan dalam upaya intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan, telah diselenggarakan Forum Komunikasi dengan Pelaku Usaha (FONDASI) pada tanggal 9 Mei 2025, serta desk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha pada tanggal 9 Mei dan 17 Juni 2025.

Ke depan, untuk meningkatkan capaian indikator ini, diperlukan penguatan komunikasi regulasi kepada pelaku usaha, optimalisasi pengawasan digital terhadap iklan daring, serta penyusunan panduan praktis evaluasi iklan yang sesuai dengan kebijakan terkini. Strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan dan memperkuat perlindungan konsumen terhadap klaim yang menyesatkan.

12. Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memasarkan produk suplemen kesehatan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan terhadap iklan menjadi krusial karena iklan merupakan sarana utama penyampaian informasi kepada konsumen, dan pelanggaran dalam penyampaian pesan promosi dapat menyesatkan masyarakat serta berdampak pada keselamatan dan kepercayaan publik. Berikut capaian kinerjanya di Triwulan II tahun 2025:

Tabel 42 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW 1	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87,00%	82,77%	95,14%	Baik

Target pada TW II 2025 adalah sebesar 87,00% dengan realisasi sebesar 82,77%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 95,14%, masuk dalam kategori Baik.

Perbandingan kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 43 : Perbandingan Kinerja Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya

IKU	Capaian TW I	Capaian TW II	Perbandingan
Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93,46%	95,14%	Lebih Besar

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja di triwulan II lebih besar bila dibandingkan dengan capaian kinerja di triwulan I.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 44 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87,00%	82,77%	95,14%	Akan tercapai

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 95,14%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan menunjukkan capaian sebesar 82,77% dari target 87,00%, dengan capaian kinerja 95,14% yang termasuk dalam kategori “baik”. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, capaian ini tetap menunjukkan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap iklan suplemen kesehatan.

Penyebab utama belum tercapainya target ini adalah perubahan kebijakan terkait evaluasi pelanggaran iklan, yaitu pembatalan Surat Edaran Deputi tentang kategorisasi temuan iklan minor dan mayor. Sebelum kebijakan tersebut dicabut, pelanggaran minor masih diklasifikasikan sebagai “memenuhi ketentuan”. Namun, setelah pembatalan, seluruh bentuk pelanggaran—termasuk pelanggaran minor—dianggap sebagai “tidak memenuhi ketentuan (TMK)”. Akibatnya, terjadi peningkatan signifikan jumlah iklan yang dikategorikan sebagai TMK, yang berimbas pada penurunan capaian indikator.

Menindaklanjuti perubahan tersebut, Deputi II BPOM telah melakukan penyesuaian definisi operasional serta melakukan analisis dan penetapan ulang target capaian, sehingga data yang disajikan dapat mencerminkan kondisi yang lebih akurat sesuai dengan kebijakan terkini.

Adapun beberapa kegiatan strategis telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator ini, antara lain:

- Monitoring dan Evaluasi (Monev) UPT pada tanggal 28 April 2025, sebagai bentuk intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan iklan suplemen kesehatan di lapangan.
- Dalam rangka intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan, telah dilakukan Forum Komunikasi dengan Pelaku Usaha (FONDASI) pada 9 Mei 2025 untuk menyampaikan hasil pengawasan serta memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi periklanan.
- Selain itu, juga telah dilaksanakan desk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha pada 9 Mei dan 17 Juni 2025, guna mendorong penyelesaian atas temuan pelanggaran secara cepat dan efektif.

Keberhasilan ini menjadi bukti efektivitas pendekatan kolaboratif antara pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kepada pelaku usaha. Namun demikian, untuk menjaga dan meningkatkan capaian di masa mendatang, dibutuhkan penyusunan pedoman teknis yang selaras dengan kebijakan terkini, penguatan kapasitas evaluator iklan, serta peningkatan literasi regulasi kepada pelaku usaha, khususnya dalam hal konten iklan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas pengawasan promosi produk kosmetik di berbagai kanal, termasuk media cetak, elektronik, dan digital. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait produk kosmetik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak

menyesatkan, tidak overclaim, dan tidak menyalahgunakan persepsi publik terhadap fungsi kosmetik. Berikut capaian kinerjanya di Triwulan II tahun 2025:

Tabel 45 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71,00%	60,52%	85,24%	Cukup

Target pada TW II 2025 adalah sebesar 71,00% dengan realisasi sebesar 60,52%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 85,24%, masuk dalam kategori cukup.

Perbandingan kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 46 : Perbandingan Kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya

IKU	Capaian TW I	Capaian TW II	Perbandingan
Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	109,86%	85,42%	Lebih Rendah

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja di triwulan II lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja di triwulan I.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 47 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71,00%	60,52%	85,24%	Akan Tercapai

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 85,24%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan II Tahun 2025, indikator Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan menunjukkan capaian sebesar 60,52% dari target yang ditetapkan yaitu 71,00%, dengan persentase capaian kinerja 85,24%. Berdasarkan kriteria penilaian, capaian ini termasuk dalam kategori “cukup”.

Meskipun belum mencapai target, capaian indikator ini tetap mencerminkan adanya keberhasilan relatif dalam pengawasan iklan kosmetik, terutama jika dilihat dari konteks kebijakan yang berubah signifikan. Penyebab utama tidak tercapainya target ini adalah dampak dari pembatalan Surat Edaran Deputi terkait kategorisasi temuan iklan minor dan mayor, yang sebelumnya menjadi dasar dalam menyimpulkan apakah suatu iklan memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Dengan pembatalan Surat Edaran tersebut, pelanggaran minor yang sebelumnya masih dikategorikan sebagai “memenuhi ketentuan” kini diperlakukan sebagai pelanggaran penuh (TMK). Akibatnya, terjadi lonjakan jumlah iklan yang dinilai tidak memenuhi ketentuan, sehingga secara statistik menurunkan nilai persentase iklan kosmetik yang sesuai regulasi.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Deputi II BPOM telah mengambil langkah-langkah penting yang menjadi bagian dari intervensi perbaikan kinerja, antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Iklan Kosmetik untuk periode Januari–April 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan evaluasi iklan di tingkat UPT sesuai dengan peraturan terbaru.
2. Pembatalan secara resmi terhadap Surat Edaran Deputi mengenai kategorisasi temuan minor dan mayor, yang sekaligus menandai penyesuaian definisi operasional dalam menilai pelanggaran iklan.
3. Usulan dan persetujuan perubahan target pengawasan iklan tahun 2025 menjadi 60%, sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan baru dan rekomendasi hasil audit BPK Tahun 2024, yang mempertimbangkan realita implementasi regulasi dan kapabilitas pengawasan.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen Deputi II BPOM dalam menyesuaikan sistem pengawasan iklan kosmetik dengan kerangka regulasi terbaru, sekaligus memperbaiki akuntabilitas dalam pelaporan kinerja. Ke depan, diperlukan peningkatan kapasitas evaluator iklan, penguatan pemahaman pelaku usaha kosmetik terhadap regulasi iklan, serta penyusunan pedoman teknis yang selaras dengan kebijakan terkini, guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendukung pencapaian indikator secara optimal.

14. Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar

Indikator Persentase Inovasi Obat Bahan Alam (OBA) yang Didampingi Sesuai Standar merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur efektivitas peran Deputi II BPOM, khususnya dalam mendukung pengembangan produk inovatif berbasis bahan alam melalui kegiatan pendampingan yang terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan regulasi. Pendampingan ini mencakup aspek pemenuhan standar keamanan, mutu, dan manfaat, serta asistensi terhadap pelaku inovasi dalam proses pendaftaran, sertifikasi, dan penguatan daya saing produk. Berikut capaian kinerjanya di Triwulan II tahun 2025:

Tabel 48 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target Triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	41,50%	45,15%	108,80%	Sangat Baik

Target pada TW II 2025 adalah sebesar 41,50% dengan realisasi sebesar 45,15%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 108,80%, masuk dalam kategori sangat baik.

Perbandingan kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 49 : Perbandingan Kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap kinerja di triwulan Sebelumnya

IKU	Capaian TW I	Capaian TW II	Perbandingan
Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	112,50%	108,80%	Lebih Rendah

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja di triwulan II lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja di triwulan I.

Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 50 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	51,00%	45,15%	108,80%	Tercapai / Melampaui

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 108,80%, maka diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian indikator Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar mencapai 45,15% dari target 41,50%, dengan capaian kinerja 108,80%. Berdasarkan kriteria penilaian, capaian ini masuk dalam kategori “sangat baik”.

Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pendekatan pendampingan yang dilakukan Deputi II BPOM, baik dari sisi strategi pelaksanaan maupun keterlibatan pemangku kepentingan. Beberapa faktor utama yang mendorong keberhasilan ini antara lain:

- Intensifikasi kegiatan pendampingan, khususnya dalam penyusunan protokol uji praklinik dan uji klinik yang sesuai standar, yang secara langsung mempercepat kesiapan inovasi untuk proses registrasi dan komersialisasi.
- Kesesuaian materi dan metode pendampingan dengan kebutuhan nyata dari pelaku usaha dan peneliti, sehingga lebih aplikatif dan tepat guna.
- Tingkat pemahaman dan kesiapan dari peneliti dan pelaku usaha dalam menerima, menerapkan, dan menindaklanjuti hasil pendampingan secara aktif.
- Pemanfaatan platform daring, yang memperluas jangkauan partisipasi pendampingan, termasuk dari daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pembinaan langsung.

Untuk mendukung capaian tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan strategis, antara lain:

1. Program PEDULI RISET (Pendampingan Uji Praklinik dan Uji Klinik kepada Industri serta Peneliti), yang bertujuan memberikan pendampingan intensif terhadap penyusunan protokol uji yang sesuai standar ilmiah dan regulasi.
2. Webinar Penelitian Uji Praklinik/Klinik Obat Bahan Alam, sebagai sarana penyampaian informasi terkini, studi kasus, dan diskusi terbuka antara regulator, peneliti, dan pelaku usaha.

Ke depan, keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperkuat ekosistem inovasi obat bahan alam nasional. Strategi lanjutan yang perlu dioptimalkan

meliputi pemetaan kebutuhan pendampingan lanjutan, penguatan kolaborasi dengan lembaga riset dan akademisi, serta peningkatan kualitas materi pendampingan agar semakin responsif terhadap tantangan inovasi berbasis sumber daya alam Indonesia.

15. Persentase Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik

Tabel 51 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos terhadap target Triwulan II 2025

IKU	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria / Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	3%	3,11%	103,67%	Sangat Baik

Target pada TW II 2025 adalah sebesar 3,00% dengan realisasi sebesar 3,11%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 103,67%, masuk dalam kategori sangat baik. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja triwulan sebelumnya. Sementara perbandingan realisasi kinerja terhadap target tahunan adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 52 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos terhadap target target Tahunan 2025

IKU	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60,00%	3,11%	5,18%	Butuh Upaya Keras

Capaian kinerja pada TW II 2025 adalah sebesar 5,18%, maka diperlukan upaya yang cukup keras, agar capaian kinerja dapat tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan

Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian indikator Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik menunjukkan hasil yang melampaui target, yaitu realisasi sebesar 3,11% dari target 3,00%, dengan capaian kinerja 103,67%. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian ini masuk dalam kategori "sangat baik".

Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas strategi pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan secara terstruktur dan intensif oleh Deputi II BPOM. Faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap capaian ini meliputi:

1. Peran aktif fasilitator dalam melakukan pendampingan teknis kepada UMKM, baik dari sisi pemahaman regulasi, tata cara produksi yang sesuai standar, hingga penyusunan dokumen mutu.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja fasilitator secara berkala, yang memastikan kualitas pendampingan tetap terjaga dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil.

Untuk mencapai hasil tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung utama, antara lain:

- Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator UMKM OBA dan Kosmetik pada tanggal 24 s.d. 27 Februari 2025, yang memberikan bekal teknis dan komunikasi kepada para fasilitator agar mampu mendampingi UMKM secara efektif.
- Penetapan Fasilitator UMKM OBA dan Kos melalui Surat Keputusan Deputi II, sebagai bentuk penguatan kelembagaan peran pendamping dalam proses pembinaan UMKM.
- Kegiatan monitoring, desk fasilitator, dan peningkatan kompetensi fasilitator pada 17 Juni 2025, yang menjadi sarana evaluasi kinerja dan penyegaran materi teknis bagi fasilitator.

Capaian ini menjadi langkah positif dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh dan patuh terhadap standar keamanan dan mutu produk. Ke depan, strategi peningkatan jumlah fasilitator, digitalisasi proses pendampingan, dan sinergi lintas sektor diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk bertransformasi menuju industri yang berdaya saing dan memenuhi persyaratan keamanan serta mutu.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Rekomendasi pada Triwulan I untuk meningkatkan kinerja antara lain:

- Mendorong percepatan eksekusi kegiatan prioritas dengan penjadwalan yang lebih adaptif,
- Meningkatkan monitoring internal secara berkala untuk merespons hambatan teknis secara cepat,
- Mengembangkan strategi edukasi publik dan pembinaan pelaku usaha berbasis risiko,
- Memperkuat sinergi lintas sektor dan antarunit dalam pengawasan, pembinaan, dan penindakan

Dari rekomendasi tersebut, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu:

- Telah dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, yang diiringi dengan peningkatan realisasi anggaran, dari 15,56% menjadi 44,78%
- Telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara rutin tiap bulannya.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Triwulan II Tahun 2025, Deputi II BPOM telah merealisasikan anggaran sebesar Rp7.230.935.663 dari pagu efektif sebesar Rp16.145.965.000, yang berarti tingkat serapan anggaran mencapai 44,78%. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan Triwulan I yang baru mencapai 15,56%, dan melampaui target kumulatif semester I yang ditetapkan sebesar 40% (berdasarkan Rencana Penarikan Dana/RPD).

Peningkatan serapan anggaran ini menunjukkan bahwa strategi penjadwalan ulang kegiatan yang dilakukan setelah evaluasi Triwulan I terbukti efektif dalam mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan strategis seperti intensifikasi pengawasan, pelatihan peningkatan kapasitas, pemenuhan sarana pelayanan publik, serta pelaksanaan kajian keamanan, mutu, dan manfaat produk telah berkontribusi pada percepatan penyerapan anggaran.

Lebih jauh, capaian kinerja organisasi juga menunjukkan tren yang positif, dengan sebagian besar indikator kinerja berhasil melampaui target triwulanannya. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi anggaran yang optimal turut mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan program. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran Deputi II BPOM pada semester I tahun 2025 berada pada kategori **baik**, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang selaras dengan pencapaian kinerja.

Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.

Tabel 53 : Peengukuran Tingkat Efisiensi per Sasaran Program

No.	Sasaran Program	Input	Output	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	100,00%	98,36%	-0,02
2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	0	n/a	n/a
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	0	n/a	n/a
4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	100,00%	106,23%	0,06
5	Layanan Publik BPOM yang Prima		n/a	n/a
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		n/a	n/a

Dari tabel di atas terlihat bahwa sasaran program Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan belum terlaksana secara efisien dengan tingkat efisiensi 0,02. Namun untuk sasaran program Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, telah terlaksana secara efisien dengan tingkat efisiensi 0,06.

PENUTUP

BAB IV

**Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2025**

BAB IV Penutup

Pada Triwulan II Tahun 2025, Deputi II BPOM menunjukkan kinerja yang cukup solid dan terarah, sebagaimana tercermin dari nilai kinerja organisasi sebesar 99,93, yang mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan program prioritas dan efektivitas pencapaian indikator strategis. Realisasi anggaran tercapai sebesar 44,78% dari pagu efektif, melampaui target penyerapan triwulan yang ditetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar 40%. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan anggaran telah dijalankan secara disiplin dan selaras dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Beberapa indikator kinerja utama telah berhasil melampaui target, antara lain:

- Persentase Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu,
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
- Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan,
- Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar,
- Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi pengawasan, pendampingan pelaku usaha, serta sinergi antara pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mendukung kinerja pengawasan post-market.

Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Deputi II BPOM

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputi II BPOM menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pengawasan serta pencapaian kinerja di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Permasalahan utama yang diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Ketidakterpenuhinya Target pada Beberapa Indikator Kinerja

Masih terdapat sejumlah indikator kinerja strategis yang tidak mencapai target, khususnya yang terkait dengan pengawasan fasilitas produksi dan distribusi, serta kepatuhan iklan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya pengawasan, perubahan definisi operasional, serta kendala teknis di lapangan.

2. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang Masih Variatif

Meskipun upaya pembinaan terus dilakukan, masih ditemukan pelaku usaha—terutama dari sektor UMKM—yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan standar keamanan, mutu, dan penandaan produk sesuai regulasi. Hal ini berdampak pada tingginya temuan produk tidak memenuhi ketentuan (TMK) di lapangan.

3. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Rasio antara beban kerja pengawasan dengan ketersediaan personel dan dukungan anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program yang optimal. Kegiatan intensifikasi pengawasan, pembinaan, dan inovasi layanan membutuhkan dukungan SDM yang kompeten dan distribusi anggaran yang efisien.

4. Perubahan Kebijakan dan Penyesuaian Target Kinerja

Beberapa perubahan kebijakan, seperti pembatalan surat edaran terkait klasifikasi pelanggaran iklan dan penandaan, mengakibatkan pergeseran interpretasi terhadap pemenuhan ketentuan. Hal ini berdampak pada penurunan persentase capaian indikator meskipun tidak mencerminkan penurunan kualitas pengawasan secara substansial.

5. Kualitas Data dan Pelaporan yang Belum Optimal

Ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sampling dan pelaporan hasil pengawasan oleh beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hal ini memengaruhi validitas data capaian dan menghambat proses evaluasi kinerja secara menyeluruh.

Sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan utama yang dihadapi Deputi II BPOM, direkomendasikan beberapa strategi prioritas yang perlu segera diimplementasikan:

1. Penguatan kapasitas SDM

Meningkatkan kompetensi pegawai Deputi II dan UPT BPOM melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, dan pendampingan, khususnya dalam pengawasan berbasis risiko, pemahaman regulasi, serta keterampilan analisis data dan pelaporan.

2. Optimalisasi koordinasi pusat-daerah

Memperkuat koordinasi antara unit pusat dan UPT di daerah guna memastikan keselarasan pelaksanaan pengawasan dan percepatan tindak lanjut hasil temuan.

3. Perbaikan sistem pelaporan dan pencatatan

Mengembangkan sistem digital dan terintegrasi untuk pencatatan, pemantauan, dan pelaporan hasil pengawasan agar lebih akurat, real-time, dan mudah dianalisis.

4. Penyesuaian indikator dan definisi operasional

Melakukan evaluasi dan penyesuaian indikator kinerja serta definisi operasional agar sesuai dengan kondisi aktual di lapangan dan rekomendasi hasil audit, serta adaptif terhadap dinamika kebijakan.

5. Penguatan pembinaan dan edukasi pelaku usaha

Intensifikasi sosialisasi dan pendampingan regulasi kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar keamanan, mutu, dan penandaan.

6. Optimalisasi alokasi anggaran

Menyesuaikan alokasi anggaran secara lebih proporsional untuk mendukung kegiatan prioritas dan strategis Deputi II, terutama dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.

7. Penguatan sinergi lintas sektor

Membangun kemitraan dan kerja sama yang lebih erat dengan instansi terkait untuk mendukung efektivitas pengawasan dan penyelesaian permasalahan yang memerlukan keterlibatan lintas sektor.

LAMPIRAN

**Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik
Tahun 2025**

Lampiran

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
4. Matriks Capaian Kinerja Direktorat di Deputi II BPOM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN
KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD KASHURI

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Februari 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN
KOSMETIK

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65 Persen
		02 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68 Persen
		03 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62 Persen
		04 - Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83 Persen
		05 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83 Persen
		06 - Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70 Persen
		10 - Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	89 Persen
		11 - Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78 Persen
		12 - Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78 Persen

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		13 - Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87 Persen
		14 - Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	71 Persen
2.	02 - Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK, Kos	01 - Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	2 Jamu
3.	05 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86.87 Indeks
4.	06 - Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar 02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	51 Persen 60 Persen
		03 - Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56 Persen
		04 - Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12 Persen
5.	09 - Layanan Publik BPOM yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4.7 Indeks
6.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos 02 - Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos 03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos 04 - Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	89.96 persen 81.66 Nilai 5 Nilai 2.95 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 51,916,739,000 (Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5,263,879,000
2.	DR.4119 - Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	9,810,472,000
3.	DR.4121 - Pengawasan Kosmetik	8,054,681,000
4.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,900,007,000
5.	DR.4128 - Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	15,661,332,000
6.	DR.6385 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	8,226,368,000

Jakarta, 11 Februari 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	3,582,245,500
			NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			F - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OT dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah			402,573,000	201,286,500	
			2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT			A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK			330,000,000	66,000,000	
			3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektor CPOTB			164,840,000	32,968,000	
			4.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan			175,250,000	35,050,000	
			5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah			229,910,000	45,982,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		6.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			051 - Registrasi Obat Bahan Alam		E - Rapat Evaluasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Resiko Tinggi			130,602,000		130,602,000	
		7.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			051 - Registrasi Obat Bahan Alam		F - Forum Komunikasi Fasilitator Registrasi dalam Rangka Perkuatan Pendampingan UMKM Start Up Obat Tradisional dan Obat Kuasi			174,100,000		174,100,000	
		8.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			051 - Registrasi Obat Bahan Alam		A - Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Obat Bahan Alam			426,487,000		426,487,000	
		9.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan		A - Penilaian Pelaksanaan Uji Praklinik dan Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			59,690,000		59,690,000	
		10.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			051 - Registrasi Obat Bahan Alam		B - Representasi Pada Sidang Tingkat TMHS			122,400,000		122,400,000	
		11.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan		D - Pertemuan Pembahasan Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka			326,550,000		326,550,000	
		12.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			051 - Registrasi Obat Bahan Alam		C - Rapat Evaluasi Registrasi Iklan Obat Bahan Alam			217,200,000		217,200,000	
		13.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan		C - Pendampingan Dan Optimalisasi Uji Praklinik Dan Atau Uji Klinik Dalam Mendukung Hilirisasi Obat Bahan Alam Indonesia			142,390,000		142,390,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		14.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			F - Workshop Uji Praklinik/Klinik			50,990,000	50,990,000	
		15.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			G - Diseminasi Riset Menuju Hilirisasi Produk Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka			378,752,000	378,752,000	
		16.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			E - Pengayaan Uji Praklinik/Klinik			94,937,000	94,937,000	
		17.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			051 - Registrasi Obat Bahan Alam			D - Pemantapan Koordinasi serta Peningkatan Kerja Sama Lintas Sektor dalam rangka Percepatan Izin Edar Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			98,033,000	98,033,000	
		19.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat			A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK			273,720,000	68,430,000	
		20.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat			B - Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Informasi Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK			128,545,000	64,272,500	
		21.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			055 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			B - Evaluasi Dokumen dan Data Uji Praklinik/Klinik Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan			259,503,000	259,503,000	
		22.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			A - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Pembahasan Laporan Efek Samping OT dan SK			158,360,000	79,180,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		23.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			B - Klasterisasi Pelaku Usaha OBA, OK dan SK Untuk Tindak Lanjut Pelanggaran Penandaan			183,895,000		91,947,500	
		24.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			D - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk OT dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan			111,880,000		55,940,000	
		25.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			E - Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan oleh UPT Badan POM			282,360,000		141,180,000	
		26.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			F - Aksi Nasional Penanganan dan Pemberantasan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat			218,375,000		218,375,000	
		02 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	2,569,919,500
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS			D - Pengayaan Kompetensi SDM Bidang Registrasi OT, SK dan Kosmetik			168,000,000		168,000,000	
		2.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			052 - Registrasi Suplemen Kesehatan			A - Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Suplemen Kesehatan			427,650,000		427,650,000	
		3.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			052 - Registrasi Suplemen Kesehatan			C - Review Hasil Penilaian Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			48,000,000		48,000,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		4.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS			B - Penatalaksanaan Data Arsip			171,600,000	171,600,000	
		5.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			052 - Registrasi Suplemen Kesehatan			D - Pembekalan Evaluator Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Tematik			363,020,000	363,020,000	
		6.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			052 - Registrasi Suplemen Kesehatan			B - Rapat Evaluasi Registrasi Iklan Suplemen Kesehatan			183,080,000	183,080,000	
		7.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS			A - Penguatan Kolaborasi Antar Sektor untuk Peningkatan Kinerja di bidang Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik			276,173,000	276,173,000	
		8.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS			C - Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan PNBP di lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik			50,160,000	50,160,000	
		9.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat			A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK			273,720,000	68,430,000	
		10.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat			B - Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Melalui Intensifikasi Informasi Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK			128,545,000	64,272,500	
		11.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			A - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Pembahasan Laporan Efek Samping OT dan SK			158,360,000	79,180,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		12.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			B - Klasterisasi Pelaku Usaha OBA, OK dan SK Untuk Tindak Lanjut Pelanggaran Penandaan			183,895,000	91,947,500	
		13.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			D - Intensifikasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk OT dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan			111,880,000	55,940,000	
		14.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			E - Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan oleh UPT Badan POM			282,360,000	141,180,000	
		15.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			F - Peningkatan Kompetensi Petugas Badan POM dan UPT Badan POM Dalam Pendampingan Monitoring Efek Samping OT dan SK serta Peningkatan Peran Tenaga Medis, Pelaku Usaha dan Masyarakat di Daerah			402,573,000	201,286,500	
		16.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT			A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK			330,000,000	66,000,000	
		17.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah			229,910,000	45,982,000	
		18.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan			175,250,000	35,050,000	
		19.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB			164,840,000	32,968,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	3,552,695,000
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			1.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik			A - Risk Analisis Data Produk Kosmetik			245,890,000		245,890,000		
			2.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik			F - Peningkatan Kompetensi Evaluator Bidang Kosmetika			257,665,000		257,665,000		
			3.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik			B - Pembahasan aspek keamanan dan klaim kosmetika			200,375,000		200,375,000		
			4.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik			A - Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik			223,980,000		223,980,000		
			5.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik			B - Public Awareness Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang dan Penyelenggaraan Public Warning			242,450,000		242,450,000		
			6.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik			C - Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik			32,646,000		32,646,000		
			7.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik			D - Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor			413,850,000		413,850,000		
			8.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik			A - Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik			519,700,000		519,700,000		
			9.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik			C - Pencegahan Terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan Dalam Penandaan Kosmetik			148,400,000		148,400,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		10.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik			E - Intensifikasi Data Permohonan Notifikasi Kosmetika			93,840,000		93,840,000	
		11.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu			055 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi efek samping kosmetik			B - Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha			122,429,000		122,429,000	
		12.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu			055 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi efek samping kosmetik			A - Peningkatan pengawasan terhadap sumber perolehan kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang			135,710,000		135,710,000	
		13.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu			055 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi efek samping kosmetik			C - Sampling dan pengujian kosmetik yang dibuat berdasarkan lisensi merek			66,050,000		66,050,000	
		14.	DR.4121.BIC.002 - Pendampingan dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar			051 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Pengawasan Kosmetik oleh UPT BPOM			A - Pelatihan Sampling Kosmetik untuk Pusat dan Daerah			149,750,000		149,750,000	
		15.	DR.4121.BIC.002 - Pendampingan dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar			051 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Pengawasan Kosmetik oleh UPT BPOM			B - Coaching Clinic Pengawasan Mutu dan Keamanan Kosmetik bagi Petugas			171,330,000		171,330,000	
		16.	DR.4121.BIC.002 - Pendampingan dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar			052 - Pendampingan Kepada UPT di Bidang Kosmetik			A - Pembinaan UPT dalam rangka pengawasan kosmetik			318,000,000		318,000,000	
		17.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik			C - Representasi di Sidang Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetika			132,400,000		132,400,000	
		18.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan			053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik			D - Pembahasan Notifikasi Kosmetika dengan Stakeholder dalam rangka Peningkatan Pelayanan Notifikasi Kosmetik			78,230,000		78,230,000	
		04 - Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam,											83	3,598,766,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			2.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			B - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan			500,000,000		500,000,000		
			3.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			C - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Kosmetik			750,000,000		750,000,000		
			4.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			A - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Obat Bahan Alam			500,000,000		500,000,000		
			5.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	054 - Perencanaan/Monitoring/Evaluasi pengelolaan dan kinerja di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			A - Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang OT, SK dan Kos			44,500,000		44,500,000		
			6.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	054 - Perencanaan/Monitoring/Evaluasi pengelolaan dan kinerja di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			B - Peningkatan Kompetensi Pegawai			256,350,000		256,350,000		
			7.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			A - Sosialisasi Regulasi di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			250,000,000		250,000,000		
			8.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			B - Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor			500,000,000		500,000,000		
			9.	DR.4129.PFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	056 - Monitoring dan evaluasi kinerja standardisasi OT, Suplemen Kesehatan, Kosmetik			A - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja			297,916,000		297,916,000		
			10.	DR.4129.PFA.002 - Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar OBA, SK, dan Kos			A - Penyusunan dan pembahasan regulasi Obat Bahan Alam			250,000,000		250,000,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO												KONTRIBUSI
		11.	DR.4129.PFA.002 - Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar OBA, SK, dan Kos				B - Penyusunan dan Pembahasan regulasi Suplemen kesehatan				250,000,000	250,000,000		
		05 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	902,584,000
		NO	RO												KONTRIBUSI
		1.	DR.4119.BIC.002 - keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor	051 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguanan dan Efektifitas Pengawasan OBA OK SK			B - Intensifikasi Pengawasan Informasi dan Promosi di Media Online			217,680,000			217,680,000		
		2.	DR.4119.BIC.002 - keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor	052 - Peningkatan pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK			A - Perkuatan literasi masyarakat terkait informasi dan promosi melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial bersinergi dengan pemangku kepentingan			188,860,000			188,860,000		
		3.	DR.4119.BIC.002 - keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor	051 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguanan dan Efektifitas Pengawasan OBA OK SK			A - Perkuatan Jejaring Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			93,460,000			93,460,000		
		5.	DR.4121.BIC.001 - Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor	051 - Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Kosmetik			B - Penguanan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0			269,624,000			269,624,000		
		6.	DR.4121.BIC.001 - Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor	051 - Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Kosmetik			A - Implementasi Post Border Patrol Untuk Penguanan Pengawasan Kosmetik Impor Ilegal			132,960,000			132,960,000		
		06 - Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan		86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	354,341,000
		NO	RO												KONTRIBUSI
		1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi			C - Inspeksi Komprehensif dalam			659,550,000			164,887,500		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
			Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko					
		2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan			173,150,000	43,287,500	
		3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			A - Pembentukan Inspektor Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			224,664,000	56,166,000	
		5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah			229,910,000	22,991,000	
		6.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan			175,250,000	17,525,000	
		7.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektor CPOTB			164,840,000	16,484,000	
		8.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT			A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK			330,000,000	33,000,000	
07 - Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	354,341,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen			A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah			229,910,000	22,991,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
			suplemen kesehatan sesuai standar			Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM								
		2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektor CPOTB			164,840,000		16,484,000
		3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko			659,550,000		164,887,500
		5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			A - Pembentukan Inspektor Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			224,664,000		56,166,000
		6.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT			A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK			330,000,000		33,000,000
		7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan			173,150,000		43,287,500
		8.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan			175,250,000		17,525,000
		08 - Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP			A - Penilaian DIP			187,991,000		187,991,000
		3.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika			053 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut			A - Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan			415,440,000		207,720,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
			yang diselesaikan Tepat Waktu			pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik			Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat					
		4.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP			F - Supervisi Penilaian DIP UPT			148,448,000	148,448,000	
		5.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP			I - Pembahasan Pedoman Pola Tindak Hasil Penilaian DIP			73,380,000	73,380,000	
		6.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP			H - Intensifikasi Penilaian DIP dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian DIP			68,000,000	68,000,000	
		7.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP			G - Forum Koordinasi Teknis Auditor DIP			124,725,000	124,725,000	
		8.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP			E - Penentuan Produk Prioritas berdasarkan tingkat resiko			80,130,000	80,130,000	
		9.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP			D - Penguatan Kapasitas Auditor DIP Kosmetik			496,672,000	496,672,000	
		10.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP			C - Pembahasan Dan Penyusunan Pedoman Safety Assessor Kosmetika			94,330,000	94,330,000	
		11.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar			051 - Penilaian DIP			B - Evaluasi Hasil Penilaian DIP			213,137,000	213,137,000	
		09 - Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	354,341,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko			659,550,000		164,887,500
		2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT			A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK			330,000,000		33,000,000
		3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB			164,840,000		16,484,000
		4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			A - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			224,664,000		56,166,000
		5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah			229,910,000		22,991,000
		7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			B - Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan			173,150,000		43,287,500
		8.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan			175,250,000		17,525,000
		10 - Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	354,341,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan			051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT			A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan			330,000,000		33,000,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
			pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar						Pengawasan OT dan SK					
		2.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektor CPOTB			164,840,000		16,484,000
		3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah			229,910,000		22,991,000
		4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			A - Pembentukan Inspektor Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			224,664,000		56,166,000
		5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			B - Pertemuan Koordinasi Inspektor OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan			173,150,000		43,287,500
		7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK			C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko			659,550,000		164,887,500
		8.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan			175,250,000		17,525,000
		11 - Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan			78	78	78	78	78	78	78	78	78	957,720,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.4121.QDI.002 - BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan			051 - Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Sarana BUPN Kosmeti			C - Upaya kolaboratif dalam rangka pengembangan dan pengawasan usaha kontrak produksi kosmetik			419,800,000		419,800,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		2.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu			053 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik			A - Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat				415,440,000		207,720,000
		3.	DR.4121.QDI.002 - BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan			051 - Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Sarana BUPN Kosmeti			A - Intensifikasi Pemeriksaan Sarana BUPN				201,320,000		201,320,000
		4.	DR.4121.QDI.002 - BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan			051 - Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Sarana BUPN Kosmeti			B - Penyusunan Agenda Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam rangka Pengembangan dan Pengawasan Usaha Kontrak Produksi Kosmetik				128,880,000		128,880,000
	12 - Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	500,130,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			E - Pengembangan Kompetensi Petugas Pengawas OT dan SK melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Internasional				270,000,000		135,000,000
		3.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT			A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK				330,000,000		33,000,000
		4.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan				175,250,000		17,525,000
		5.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektor CPOTB				164,840,000		16,484,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			D - Capacity Building Direktorat Pengawasan OT dan SK			413,400,000		206,700,000
		7.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah			229,910,000		22,991,000
		8.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat			A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK			273,720,000		68,430,000
	13 - Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	500,130,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM			C - Training GMP Topik Khusus bagi Inspektur CPOTB			164,840,000		16,484,000
		3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat			A - Peningkatan Pemenuhan Ketentuan Iklan dan Penandaan Secara Konsisten oleh Pelaku Usaha OBA, OK dan SK			273,720,000		68,430,000
		4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			D - Capacity Building Direktorat Pengawasan OT dan SK			413,400,000		206,700,000
		5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu			054 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK			E - Pengembangan Kompetensi Petugas Pengawas OT dan SK melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Internasional			270,000,000		135,000,000
		6.	DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan			052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen			B - Peningkatan Kompetensi Petugas UPT Badan POM dalam Kesesuaian Evaluasi			175,250,000		17,525,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
2.	02 - Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK, Kos	01 - Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	NO				RO				KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI
			suplemen kesehatan sesuai standar				Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan					
			7. DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar				052 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan oleh Petugas UPT Badan POM				A - Pelatihan Sampling Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tingkat Pusat dan Daerah		229,910,000		22,991,000	
			8. DR.4119.BIC.001 - UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar				051 - Pendampingan, Supervisi kepada UPT				A - Supervisi UPT dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan OT dan SK		330,000,000		33,000,000	
			14 - Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	931,538,000	
			NO				RO				KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI
			2. DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu				052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik				B - Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital		434,528,000		434,528,000	
			3. DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu				052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik				D - Inspirasi (Intensifikasi Peningkatan Literasi Beauty Enthusiast)		497,010,000		497,010,000	
			NO				RO				KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	05 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	2.				DR.6385.UBA.002 - Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha				051 - Pelaksanaan Pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha		A - Program Sadar Jamu Aman		1,000,000,000	1,000,000,000
			NO				RO				KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.				DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang				053 - Komunikasi, Informasi dan		A - KIE oleh Direktorat Pemberdayaan		2,804,570,000	2,804,570,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			Edukasi oleh Deputi II			Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos						
		2.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos			052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos			E - Pengelolaan Sumber Daya Manusia			255,848,000		255,848,000	
		3.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos			052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos			D - Honor Pramubakti Direktorat PMPU OT, SK, Kos			66,345,000		66,345,000	
		4.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos			052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos			B - Layanan Perkantoran Direktorat PMPU OT, SK, Kos			107,474,000		107,474,000	
		5.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos			052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos			A - Koordinasi Pemberdayaan OBA, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor			537,365,000		537,365,000	
		6.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos			052 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PMPU OT, SK dan Kos			C - Pemeriksaan Kesehatan			150,000,000		150,000,000	
		7.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos			051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos			B - Pembentukan Penyuluhan dan Kader Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman melalui program BPOM Goes to Community			540,012,000		540,012,000	
		8.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos			051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos			A - Pembentukan dan Pemberdayaan Duta Kosmetik /Jamu Aman dalam rangka BPOM Goes to School/Campus			764,755,000		764,755,000	
4.	06 - Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	40	40	40	41.5	41.5	41.5	42.5	42.5	42.5	45	45	51	7,028,831,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			H - Coaching Clinic Sistem dan Tata Cara Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			261,840,000	261,840,000	
		2.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			L - Pelayanan Prima Notifikasi Kosmetik			569,378,000	569,378,000	
		3.	DR.4119.QDG.002 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka			052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka memproduksi fitofarmaka			C - Focus Group Discussion dalam rangka identifikasi dan penetapan fasilitas produksi Fitofarmaka bersama lintas sektor			63,680,000	63,680,000	
		4.	DR.4119.QDG.002 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka			052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka memproduksi fitofarmaka			A - Bimbingan teknis dalam rangka percepatan pemenuhan CPOTB pada Industri dan Usaha di bidang OBA yang memproduksi OHT dan Fitofarmaka			79,120,000	79,120,000	
		5.	DR.4119.QDG.002 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi Produk Fitofarmaka			051 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini dalam rangka memproduksi fitofarmaka			A - Pemeriksaan dan Penilaian fasilitas produksi Fitofarmaka pada IEBA yang telah memenuhi CPOTB			57,200,000	57,200,000	
		6.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor			052 - Koordinasi Ekosistem Ekspor Obat Bahan Alam			B - Business Matching perluasan akses pasar jamu			27,750,000	27,750,000	
		7.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor			052 - Koordinasi Ekosistem Ekspor Obat Bahan Alam			A - Penetrasi produk jamu berpotensi ekspor ke pasar luar negeri			297,560,000	297,560,000	
		8.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor			051 - Perluasan Akses Pasar Jamu Berpotensi Ekspor			B - Jamu Export Assistance			316,285,000	316,285,000	
		9.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			M - Clustering Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			106,420,000	106,420,000	
		10.	DR.4119.QDG.001 - Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor			051 - Perluasan Akses Pasar Jamu Berpotensi Ekspor			A - Penyusunan Peta Potensi Pasar Jamu			158,405,000	158,405,000	
		12.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang			A - Forum Komunikasi Tentang Tindak Lanjut Penilaian DIP			342,438,000	342,438,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
			alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			registrasi OT, SK dan KOS								
		13.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			B - Coaching clinic DIP			99,342,000		99,342,000
		14.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			C - Bimbingan Teknis CUKB di bidang OT dan SK kepada peneliti, komisi etik, sponsor, organisasi riset kontrak			162,591,000		162,591,000
		15.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			I - Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka Percepatan Notifikasi Kosmetik			175,820,000		175,820,000
		16.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			K - Pelayanan Prima Registrasi OBA dan SK bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar			1,001,110,000		1,001,110,000
		17.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			N - Clustering Notifikasi Kosmetik			24,300,000		24,300,000
		18.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			O - Pendampingan UMKM Jamu Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Napak Tilas Jejak Empiris Penggunaan Bahan Alam di Indonesia			149,640,000		149,640,000
		19.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			Q - Implementasi Peraturan BPOM terkait bahan kosmetika terhadap produk kosmetika yang ternotifikasi			169,090,000		169,090,000
		20.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik			051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			R - Peningkatan Kompetensi UMKM dalam Pemenuhan Dosier Registrasi Obat Tradisional dan Obat Kuasi			164,600,000		164,600,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		21.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			P - Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Peningkatan Pelayanan Notifikasi Kosmetik			107,880,000			107,880,000			
		22.	DR.4119.BDI.002 - Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	051 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku			A - Pemeriksaan fasilitas produksi OBA pada IEBA yang telah memenuhi CPOTB			65,330,000			65,330,000			
		23.	DR.4119.BDI.002 - Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku			A - Focus Group Discussion dalam rangka Penyelarasan roadmap kemandirian bahan baku OBA Nasional			81,020,000			81,020,000			
		24.	DR.4119.BDI.002 - Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku			B - Dialog Interaktif dalam rangka penilaian pemenuhan CPOTB pada IEBA untuk menjamin keberlangsungan mutu Bahan Baku OBA			203,650,000			203,650,000			
		25.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			D - Desk dan Percepatan Notifikasi khusus UMKM Kosmetik			190,220,000			190,220,000			
		26.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			F - Bimbingan Teknis dan Edukasi Pelaku Usaha di Bidang Kosmetika			454,492,000			454,492,000			
		27.	DR.4128.QDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	051 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS			G - OSS Jemput Bola dalam rangka percepatan penyelesaian registrasi OT, SK dan Kosmetik di Daerah			1,699,670,000			1,699,670,000			
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos							3	10	15	20	35	45	60	4,964,569,000
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.4119.QDG.003 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	051 - Akselerasi peningkatan kapasitas UMK melalui program naik kelas umk OBA Indonesia (NUANSA)			A - DESK CAPA kepada UMK di bidang Obat Bahan Alam dalam rangka Pemenuhan Program NUANSA			370,810,000			370,810,000			
		2.	DR.4119.QDG.003 - Keputusan Hasil Penilaian	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi			A - Bimbingan teknis kepada UMK di bidang			289,190,000			289,190,000			

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan			Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku			Obat Bahan Alam dalam rangka program NUANSA					
		3.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			A - Penguatan Pembinaan UMKM OBA melalui Fasilitator			806,043,000	806,043,000	
		4.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			B - Penguatan Olahan Jamu berdasarkan Kearifan Lokal			262,080,000	262,080,000	
		5.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			C - Peningkatan Pangsa Pasar melalui Program UMKM Meet Market			558,660,000	558,660,000	
		6.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			D - Pengembangan dan Inovasi untuk Mendukung Daya Saing UMKM Obat Bahan Alam			169,450,000	169,450,000	
		7.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			F - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM			113,267,000	113,267,000	
		8.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			B - Penguatan Kapasitas Fasilitator UMKM Kosmetik			343,595,000	343,595,000	
		9.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			C - Expo Kosmetik Indonesia			309,625,000	309,625,000	
		10.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			D - Implementasi Program Orang Tua Angkat UMKM			264,740,000	264,740,000	
		11.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			E - Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kosmetik			300,000,000	300,000,000	
		12.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			F - Sinergitas Bersama Lintas Sektor dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Kosmetik			205,045,000	205,045,000	
		13.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			G - Pengembangan dan Inovasi Kosmetik Berbahan Alam Indonesia			105,345,000	105,345,000	
		14.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			H - Pengelolaan Arsip dan BMN			177,669,000	177,669,000	
		15.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar			E - Sinergitas Lintas Sektor dalam Mendukung Wellness Tourism			287,500,000	287,500,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		16.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar			052 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM Kosmetik yang sesuai standar			A - Intensifikasi Pendampingan Start Up dan UMKM Kosmetik			401,550,000		401,550,000		
		03 - Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh													56	1,100,000,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.4121.QDI.001 - Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh			051 - Pelaksanaan Program Maturitas Industri Kosmetik Terhadap Pemenuhan Aspek CPKB			A - Akselerasi Maturitas Industri Kosmetik terhadap Pemenuhan Aspek CPKB			1,100,000,000		1,100,000,000		
		04 - Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini													12	400,000,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.4119.BDI.001 - Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB			052 - Penyempurnaan prosedur penilaian maturitas industri OBA			A - Penyusunan Database Pengawasan dalam Rangka Penilaian Maturitas Industri Obat Bahan Alam (OBA)			122,980,000		122,980,000		
		3.	DR.4119.BDI.001 - Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB			051 - Pengawasan penerapan regulasi maturitas industri OBA			A - Penilaian Tingkat Maturitas Industri Obat Bahan Alam sesuai Tools Maturitas yang Ditetapkan			277,020,000		277,020,000		
5.	09 - Layanan Publik BPOM yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan													4.7	8,760,036,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan			057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan			C - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat di bidang Kosmetik			73,463,000		73,463,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		2.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan			057 – Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan			B - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat Suplemen Kesehatan			220,000,000		220,000,000
		3.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan			057 – Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan			A - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Obat Bahan Alam			170,000,000		170,000,000
		4.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan			057 – Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan			D - Peningkatan Kualitas Layanan Publik			67,778,000		67,778,000
		5.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			B - Survei Kepuasan Pelanggan			329,100,000		329,100,000
		6.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			D - Pemetaan Konten dan Database Aplikasi Pelayanan Publik			420,480,000		420,480,000
		7.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			E - Penguatan Pelayanan Publik Prima Direktorat registrasi OT, SK dan Kos			1,086,055,000		1,086,055,000
		8.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			G - Pembekalan staff dalam rangka Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan Publik			270,300,000		270,300,000
		9.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			H - Monev Pelayanan Pengaduan			10,200,000		10,200,000
		11.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK			D - Intensifikasi Pengawasan Importir OBA dan SK dalam rangka Pengetatan Arus Impor Barang Tertentu			173,990,000		173,990,000
		12.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			A - Peningkatan Kualitas Layanan Publik			932,700,000		932,700,000
		13.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			C - Publikasi Layanan Publik			92,436,000		92,436,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		14.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima			051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi			F - Development Dialogue dalam rangka Penguatan Tim Kerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			176,700,000		176,700,000
		15.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat			A - Bimbingan Teknis Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Tradisional dengan non-Obat Tradisional bagi UKOT			116,662,000		116,662,000
		16.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat			B - Upgrading Pemahaman Penerapan CPOTB pada Personil Kunci Industri di Bidang Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan			133,320,000		133,320,000
		17.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat			C - Pembekalan Kepada Pelaku Usaha Distribusi terkait Pelayanan Publik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			45,100,000		45,100,000
		18.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK			B - Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk CAPA Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen kesehatan			174,040,000		174,040,000
		19.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK			A - Pemeriksaan Sarana Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan dalam rangka Perizinan dan Pemenuhan CPOTB			375,980,000		375,980,000
		20.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK			C - Verifikasi Teknis Permohonan Eksport dan Impor OT dan SK			61,150,000		61,150,000
		21.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK			A - Perkuatan Kooordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pengawasan Terhadap Eksportasi dan Importasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			154,500,000		154,500,000
		22.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat			053 - Peningkatan Koordinasi dalam			B - Optimalisasi Dukungan Ekspor dan			97,125,000		97,125,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
			Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK			Perlindungan Daya Saing Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor					
		23.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK			C - Peningkatan Peran UPT dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pemasukan OT SK melalui mekanisme SAS Barang Kiriman Peruntukan Pribadi			106,120,000	106,120,000	
		24.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK			D - Evaluasi Program Kerja dan Pembahasan Aktual			144,776,000	144,776,000	
		25.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK			E - Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			211,822,000	211,822,000	
		26.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK			F - Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Direktorat Pengawasan OT dan SK			100,925,000	100,925,000	
		27.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			A - Administrasi pelaksanaan pelayanan publik			306,720,000	306,720,000	
		28.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			B - Forum Konsultasi Publik			79,310,000	79,310,000	
		29.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			C - Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan Publik			92,060,000	92,060,000	
		30.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			D - Bimbingan Teknis kepada Petugas UPT dalam rangka Peningkatan pelayanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap			85,840,000	85,840,000	
		31.	DR.4119.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima			054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			E - Bimbingan teknis Bagi Petugas Dalam Rangka Peningkatan pelayanan publik SKI/SKE/SAS OT dan SK			40,560,000	40,560,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		32.	DR.6385.BAH.001 - Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima			051 - Layanan Publik Dit PMPU OTSKK yang Prima			B - Workshop Pelayanan Prima			263,900,000		263,900,000
		33.	DR.6385.BAH.001 - Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima			051 - Layanan Publik Dit PMPU OTSKK yang Prima			A - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			236,100,000		236,100,000
		34.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik			B - Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik			457,974,000		457,974,000
		35.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu			052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik			A - Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika			443,311,000		443,311,000
		36.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik			C - Percepatan Pelayanan Publik dalam Upaya Peningkatan Daya Saing melalui Peningkatan Pengetahuan Petugas dan Pelaku Usaha			92,929,000		92,929,000
		37.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik			B - Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk Konsultasi Pelayanan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik dan/atau CAPA Sertifikasi CPKB			369,510,000		369,510,000
		38.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu			051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik			A - Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi			547,100,000		547,100,000
6.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos											89.96	1,538,957,950
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK			E - Sewa Rumah Dinas Jabatan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			144,000,000		144,000,000
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK			G - Pemantapan Zona Integritas dalam rangka Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi			370,028,000		370,028,000
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK			F - Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK			180,140,000		180,140,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos			A - Evaluasi Program Kerja			394,810,000	98,702,500	
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			061 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos			A - Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi			82,690,000	82,690,000	
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			D - Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II			40,080,000	14,028,000	
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			B - Monitoring pelaksanaan SPIP dan Pembangunan Zona Integritas			111,480,000	111,480,000	
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			G - Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik			114,545,000	40,090,750	
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			E - Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik			20,730,000	7,255,500	
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			B - Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik			57,270,000	20,044,500	
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran			244,282,000	85,498,700	
		13.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi			051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM			600,000,000	300,000,000	
		14.	DR.4129.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Pengadaan Fasilitas Kantor			170,000,000	85,000,000	
		02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos											81.66	304,760,600
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			E - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja			8,400,000	8,400,000	
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			D - Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos			9,276,000	9,276,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran		244,282,000		73,284,600	
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			B - Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik		57,270,000		17,181,000	
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			E - Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik		20,730,000		6,219,000	
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			G - Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik		114,545,000		34,363,500	
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			D - Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II		40,080,000		12,024,000	
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			061 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos			B - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH		12,310,000		12,310,000	
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos			A - Evaluasi Program Kerja		394,810,000		98,702,500	
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK			C - Pemeliharaan Operasional Direktorat Pengawasan OT dan SK		33,000,000		33,000,000	
03 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos													5	960,170,500
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		2.	DR.4129.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - Pengadaan Fasilitas Kantor		170,000,000		85,000,000	
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK			B - Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK		262,950,000		262,950,000	
		4.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi			051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM		600,000,000		300,000,000	
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			058 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK			A - Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputi II		5,880,000		5,880,000	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos			A - Evaluasi Program Kerja			394,810,000	98,702,500		
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			A - Pemenuhan Keperluan perkantoran			166,720,000	166,720,000		
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			F - Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan			8,400,000	8,400,000		
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			G - Penataan dan Pengelolaan BMN			25,750,000	25,750,000		
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			F - Honorarium Pengelola PNBP Direktorat Pengawasan Kosmetik			6,768,000	6,768,000		
		04 - Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												2.95	425,419,950
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			062 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK, dan Kos			A - Evaluasi Program Kerja			394,810,000	98,702,500		
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			B - Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik			57,270,000	20,044,500		
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			061 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos			C - Pemeriksaan Kesehatan Pegawai			105,000,000	105,000,000		
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			D - Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II			40,080,000	14,028,000		
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			060 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos			C - Pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi 9001:2015			10,500,000	10,500,000		
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			G - Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik			114,545,000	40,090,750		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN													
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12														
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI															
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			E - Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik		20,730,000		7,255,500															
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			059 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kometik			A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran		244,282,000		85,498,700															
															Total 51,916,739,000													

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.4.09.24.46 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2025.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,



MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR 02.02.4.09.24.46 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2025

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65
		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	67
		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	61
		Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83
	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	20%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	84
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	87,5
	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase kemandirian pelaku usaha OBA dalam rangka inovasi obat bahan alam	51%
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	60
		Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56%
		Persentase Industri Obat bahan Alam yang meningkat maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12
	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4.69
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.68

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81.45
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	95.36
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3.4

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,



MOHAMAD KASHURI

MATRIKS TINDAK LANJUT

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	TimeLine	TRIWULAN II			Kondisi Akhir	
					Program Rencana Aksi		Belum		
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	capaian indikator yang telah mencapai target triwulan	Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan: 1. Hasil evaluasi terhadap hasil uji UPT masih banyak ditemukan ketidaksesuaian, baik ketidaksesuaian terhadap parameter uji, ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan, dan ketidaksesuaian dalam proses pengujian sampel TMS 2. TMK penandaan mengalami kenaikan karena adanya TMK minor dan penambahan kategori sampling 3. TMS Oba Masih didominasi oleh Mikro diikuti dengan TMS Farmasetik	1. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan 2. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk OBA tidak aman dan bermutu	TW 2 - TW 4	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Monitoring pelaksanaan pengawasan OBA oleh UPT terkait penandaan dan pelaksanaan sampling pada tanggal 28 April 2025 dan 16 Juni 2025 2. Telah dikirimkan Nodin Direktur Pengawasan OTSK kepada P3OMN terkait hasil evaluasi hasil pengujian UPT 3. Pelatihan sampling plan bagi UPT dan Pelaku usaha dalam rangka jaminan mutu produk tanggal 23 Juni 2025 Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan produk OBA TMS 1. Desk kepada pelaku usaha terkait iklan dan penandaan pada tanggal 9 Mei dan 17 Juni 2025 terkait tindak lanjut temuan penandaan dan tanggal 16 juni terkait temuan TMS hasil pengujian 2. Forum komunikasi kepada pelaku usaha (FONDASI) 9 Mei 2025 3. Inspeksi untuk penelusuran produk yang diduga dipalsukan penandaannya ke 3 saran 4. Pembingkisan teknis identifikasi root cause dan penyusunan CAPA kepada pelaku usaha	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Penyusunan juknis penanganan cemaran mikrobiologi pada OBA 2. Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan UPT Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan produk OBA TMS 1. Forum komunikasi kepada pelaku usaha terkait dispensasi kemasan 2. Monitoring dan evaluasi terhadap 75 pelaku usaha dengan riwayat temuan penandaan berulang 3. Desk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha 4. Inspeksi untuk penelusuran produk yang diduga dipalsukan penandaannya	Penandaan: TW 3 s.d TW 4	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Pelaksanaan pengawasan oleh UPT sesuai dengan standar dan pemilihan sampling dan metode pengujian sesuai dengan pedoman sampling sehingga hasil pengujian dapat menggambarkan OBA aman dan bermutu 2. Kenaikan jumlah sampel yang telah disampling dan diuji oleh UPT
2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	capaian indikator yang telah melebihi target triwulan dengan kategori tidak dapat disimpulkan	Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan: 1. Hasil evaluasi terhadap hasil uji UPT masih banyak ditemukan ketidaksesuaian, baik ketidaksesuaian terhadap parameter uji, ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan, dan ketidaksesuaian dalam proses pengujian sampel TMS 2. TMK penandaan mengalami kenaikan karena adanya TMK minor dan penambahan kategori sampling	1. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan 2. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk SK tidak aman dan bermutu	TW 2 - TW 4	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Monitoring pelaksanaan pengawasan OBA oleh UPT terkait penandaan dan pelaksanaan sampling pada tanggal 28 April 2025 dan 16 Juni 2025 2. Telah dikirimkan Nodin Direktur Pengawasan OTSK kepada P3OMN terkait hasil evaluasi hasil pengujian UPT 3. telah dilaksanakan FGD terkait Pengembangan MA produk SK dengan komposisi tunggal dengan direkrut standarisasi OTSKKos, P3OMN dan Ditreg OTSKKos Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan produk OBA TMS 1. Desk kepada pelaku usaha terkait iklan dan penandaan pada tanggal 9 Mei dan 17 Juni 2025 terkait tindak lanjut temuan penandaan 2. Forum komunikasi kepada pelaku usaha (FONDASI) 9 Mei 2025	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan UPT Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan produk SK TMS 1. Forum komunikasi kepada pelaku usaha terkait dispensasi kemasan 2. Monitoring dan evaluasi terhadap 75 pelaku usaha dengan riwayat temuan penandaan berulang 3. Desk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha 4. Inspeksi untuk penelusuran produk yang diduga dipalsukan penandaannya 5. Pengembangan MA Produk SK dengan Komposisi Tunggal (lanjutan dari hasil FGD)	Penandaan: TW 3 s.d TW 4	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Pelaksanaan pengawasan oleh UPT sesuai dengan standar dan pemilihan sampling dan metode pengujian sesuai dengan pedoman sampling sehingga hasil pengujian dapat menggambarkan OBA aman dan bermutu 2. Kenaikan jumlah sampel yang telah disampling dan diuji oleh UPT
3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	capaian indikator yang telah mencapai target triwulan	Melaksanakan monev kepada UPT terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Kosmetik T.A. 2025.	TW 2 sd TW 4	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Melaksanakan monev kepada UPT terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Kosmetik T.A. 2025 pada bulan April 2025. 2. Melakukan pembatalan terkait surat edaran deputi terkait kategorisasi temuan penandaan minor dan mayor 3. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penandaan Kosmetik bulan Januari – April 2025 pada tanggal 21 Mei 2025	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Monitoring pelaksanaan sampling dan pengujian di bulan Juli Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan produk Kosmetik TMS 1. Melakukan desk kepada UPT yang capaian sampling pengujiannya dan tingkat kesesuaianya masih rendah	TW 2 sd TW 4	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Pelaksanaan pengawasan oleh UPT sesuai dengan standar dan pemilihan sampling dan metode pengujian sesuai dengan pedoman sampling sehingga hasil pengujian dapat menggambarkan Kosmetik aman dan bermutu 2. Kenaikan jumlah sampel yang telah disampling dan diuji oleh UPT	
4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Capaian indikator dihitung pada akhir tahun	Progres dalam perhitungan indikator: Telah dilakukan pembahasan dengan Pusakom dan Unit Kerja terkait termasuk Biro Perencanaan dan Keuangan, Akan dilakukan perubahan indikator menjadi Indeks Kualitas Kebijakan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Setelah dilakukan penetapan	Perubahan indikator APM KK menjadi IKK	TW III	Pembahasan dengan LAN dan unit terkait mengenai tools penilaian APM KK	-	Rencana mengubah APM KK menjadi IKK	
5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	capaian indikator yang telah mencapai target triwulan	Koordinasi dan monitoring kepada lintas sektor dalam tindaklanjut hasil pengawasan	TW 2 s.d TW 4	monitoring hasil rekomendasi takedown ke platform e-commerce dan Komdigdi telah dipantau selama TW 2	forum koordinasi dengan IdEA, platform e-commerce dan lintas sektor lainnya	TW 3 s.d TW 4	Rekomendasi tindaklanjut hasil pengawasan OBA,SK dan Kosmetik yang ditindaklanjuti pelaku usaha	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	TimeLine	TRIWULAN II				Kondisi Akhir	
					Program Rencana Aksi		Belum	Timeline		
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana aksi yang belum selesai				
(1)	1 Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	capaian indikator yang telah mencapai target triwulan Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan: 1. Hasil evaluasi terhadap hasil uji UPT masih banyak ditemukan ketidak sesuaian, baik ketidaksesuaian terhadap parameter uji, ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan, dan ketidaksesuaian dalam proses pengujian sampel TMS 2. TMK penandaan mengalami kenaikan karena adanya TMK minor dan penambahan kategori sampling 3. TMS Oba Masih didominasi oleh Mikro diikuti dengan TMS Farmasetik	1. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan 2. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk OBA tidak aman dan bermutu	TW 2 - TW4	<p>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</p> 1. Monitoring pelaksanaan pengawasan OBA oleh UPT terkait penandaan dan pelaksanaan sampling pada tanggal 28 April 2025 dan 16 Juni 2025 2. Telah dikirimkan Nodin Direktur Pengawasan OTSK kepada P3OMN terkait hasil evaluasi hasil pengujian UPT 3. Pelatihan sampling plan bagi UPT dan Pelaku usaha dalam rangka jaminan mutu produk tanggal 23 Juni 2025 <p>Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan produk OBA TMS</p> 1. Desk kepada pelaku usaha terkait iklan dan penandaan pada tanggal 9 Mei dan 17 Juni 2025 terkait tindak lanjut temuan penandaan dan tanggal 16 juni terkait temuan TMS hasil pengujian 2. Forum komunikasi kepada pelaku usaha (FONDASI) 9 Mei 2025 3. Inspeksi untuk penelusuran produk yang diduga dipalsukan penandaannya ke 3 sarena 4. Pembingkiran teknis identifikasi root cause dan penyusunan CAPA kepada pelaku usaha	<p>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</p> 1. Penyusunan juknis penanganan cemaran mikrobiologi pada OBA 2. Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan UPT <p>Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan produk OBA TMS</p> 1. Forum komunikasi kepada pelaku usaha terkait dispensasi kemasan 2. Monitoring dan evaluasi terhadap 75 pelaku usaha dengan riwayat temuan penandaan berulang 3. Desk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha 4. Inspeksi untuk penelusuran produk yang diduga dipalsukan penandaannya	Penandaan: TW 3 s.d TW 4	<p>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</p> 1. Pelaksanaan pengawasan oleh UPT sesuai dengan standar dan pemilihan sampling dan metode pengujian sesuai dengan pedoman sampling sehingga hasil pengujian dapat menggambarkan OBA aman dan bermutu 2. Kenaikan jumlah sampel yang telah disampling dan diujil oleh UPT <p>Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan produk OBA TMS</p> Pelaku usaha telah menindaklanjuti rekomendasi tindak lanjut TMK penandaan dan TMS pengujian		
6	6 Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Capaian indikator belum mencapai target triwulan kondisi capaian indikator berdasarkan kondisi saat ini: 1. Temuan hasil pengawasan sarana produksi OBA didominasi oleh ketidaksesuaian dalam penerapan CPOTB 2. Masih terdapat UPT yang menyampaikan tindak lanjut tidak sesuai dengan pedoman tindak lanjut. 3. Capaian masih rendah yaitu 113 sarena (36,10%), hal tersebut disebabkan karena pengembalian target pemeriksaan sarana produksi OBA ke DIPA Awal sehingga penyesuaian kembali oleh UPT BPOM diseluruh Indonesia	1. Koordinasi inspektur CPOTB dan monev OTSK UPT BPOM 2. Forum Komunikasi kepada pelaku usaha	Triwulan 1 s/d 4	<p>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</p> 1. Forum koordinasi Inspektur CPOTB dan OTSK UPT BPOM diseluruh wilayah Indonesia 2. Desk penyesuaian target UPT BPOM dalam rangka menindak lanjuti kebijakan efisiensi anggaran 3. Inhouse training inspektur OBASK tanggal 19-20 Juni 2025 <p>Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan sarana produksi OBA</p> Forum koordinasi kepada pelaku usaha	Triwulan 3 s/d 4	Terdapat peningkatan jumlah pengawasan sarana oleh UPT agar dapat menggambarkan capaian kinerja			
7	7 Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	capaian indikator belum mencapai target triwulan kondisi capaian indikator berdasarkan kondisi saat ini: Capaian masih rendah yaitu 11 sarena (20%) dari 55 sarena, hal tersebut disebabkan karena pengembalian target pemeriksaan sarana produksi OBA ke DIPA Awal sehingga penyesuaian kembali oleh UPT BPOM diseluruh Indonesia	1. Koordinasi inspektur CPOTB dan monev OTSK UPT BPOM 2. Forum Komunikasi kepada pelaku usaha	Triwulan 1 s/d 4	<p>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</p> 1. Forum koordinasi Inspektur CPOTB dan OTSK UPT BPOM diseluruh wilayah Indonesia 2. Desk penyesuaian target UPT BPOM dalam rangka menindak lanjuti kebijakan efisiensi anggaran. 3. Inhouse training inspektur OBASK tanggal 19-20 Juni 2025 <p>Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan sarana produksi SK</p> Forum koordinasi kepada pelaku usaha	Triwulan 3 s/d 4	Terdapat peningkatan jumlah pengawasan sarana oleh UPT agar dapat menggambarkan capaian kinerja			
8	8 Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	capaian indikator belum mencapai target triwulan kondisi capaian indikator berdasarkan kondisi saat ini: 1. Terjadi peningkatan jumlah sarena TMK karena penajaman analisis risiko dari UPT yang belum diimbangi dengan intensifikasi pembinaan (efisiensi anggaran) 2. Sebanyak 13 UPT (27% dari 48 UPT) belum melakukan/melaporkan pemeriksaan sarana produksi kosmetik pada semester I 2025.	Melakukan pertemuan dengan UPT untuk mengevaluasi capaian IKU hingga Triwulan III 2025, mendorong pembinaan intensif kepada industri kosmetik guna meningkatkan kepuatan CPKB, serta menyiapkan usulan penyesuaian target jika ditemukan gap	TW 2 sd TW 4	<p>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</p> Melaksanakan Monev kepada UPT terkait Target pemeriksaan sarana produksi dan distribusi kosmetik oleh UPT BPOM tahun 2025 pada tgl 28 April 2025 <p>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</p> 1. Melakukan pertemuan pembahasan monev capaian IKU bersama UPT untuk meminta UPT agar mengintensifikasi pembinaan kepada industry kosmetik untuk meningkatkan kepuatan pelaku usaha khususnya pemenuhan CPKB 2. Melakukan monitoring realisasi pencapaian target IKU hingga TW II 2025 untuk dilakukan usulan penyesuaian target apabila gap capaian signifikan.	<p>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</p> Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan dengan UPT setiap triwulan	TW 2 sd TW 4	Terdapat peningkatan capaian sarana produksi kosmetik		
9	9 Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	capaian indikator melebihi mencapai target triwulan Target melebihi capaian karena: Capaian masih rendah yaitu 619 sarena (33,75%) dari 1834 sarena, hal tersebut disebabkan karena pengembalian target pemeriksaan sarana produksi OBA ke DIPA Awal sehingga penyesuaian kembali oleh UPT BPOM diseluruh Indonesia	1. koordinasi Inspektur CPOTB dan OTSK UPT BPOM dan monitoring pelaksanaan pengawasan 2. Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan ilegal di sarana distribusi	Triwulan 1 s/d 4	<p>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</p> 1. Forum koordinasi Inspektur CPOTB dan OTSK UPT BPOM diseluruh wilayah Indonesia 2. Desk penyesuaian target UPT BPOM dalam rangka menindak lanjuti kebijakan efisiensi anggaran. 3. Inhouse training inspektur OBASK tanggal 19-20 Juni 2025 <p>Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan sarana distribusi OBA</p> Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan ilegal di sarana distribusi	Triwulan 3 s/d 4	Terdapat peningkatan capaian sarana distribusi OBA			
10	10 Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	capaian indikator telah mencapai target triwulan kondisi capaian indikator berdasarkan kondisi saat ini: Capaian masih rendah yaitu 316 sarena (33,29%) dari 949 sarena, hal tersebut disebabkan karena pengembalian target pemeriksaan sarana produksi OBA ke DIPA Awal sehingga penyesuaian kembali oleh UPT BPOM diseluruh Indonesia	1. koordinasi Inspektur CPOTB dan OTSK UPT BPOM dan monitoring pelaksanaan pengawasan 2. Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan ilegal di sarana distribusi	Triwulan 1 s/d 4	<p>Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan</p> 1. Forum koordinasi Inspektur CPOTB dan OTSK UPT BPOM diseluruh wilayah Indonesia 2. Desk penyesuaian target UPT BPOM dalam rangka menindak lanjuti kebijakan efisiensi anggaran. 3. Inhouse training inspektur OBASK tanggal 19-20 Juni 2025 <p>Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan sarana distribusi OBA</p> Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO dan ilegal di sarana distribusi	Triwulan 3 s/d 4	Terdapat peningkatan capaian sarana distribusi SK			

No	Indikator	TRIWULAN II							Kondisi Akhir	
		Kondisi Awal	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi					
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Percentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	capaian indikator yang telah mencapai target triwulan	Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan: 1. Hasil evaluasi terhadap hasil uji UPT masih banyak ditemukan ketidaksesuaian, baik ketidaksesuaian terhadap parameter uji, ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan, dan ketidaksesuaian dalam proses pengujian sampel TMS 2. TMK penandaan mengalami kenaikan karena adanya TMK minor dan penambahan kategori sampling 3. TMS Oba Masih didominasi oleh Mikro diikuti dengan TMS Farmasetik	1. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan 2. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk OBA tidak aman dan bermutu	TW 2 - TW4	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Monitoring pelaksanaan pengawasan OBA oleh UPT terkait penandaan dan pelaksanaan sampling pada tanggal 28 April 2025 dan 16 Juni 2025 2. Telah dikirimkan Nodin Direktur Pengawasan OTSK kepada P3OMN terkait hasil evaluasi hasil pengujian UPT 3. Pelatihan sampling plan bagi UPT dan Pelaku usaha dalam rangka jaminan mutu produk tanggal 23 Juni 2025 Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan produk OBA TMS 1. Desk kepada pelaku usaha terkait iklan dan penandaan pada tanggal 9 Mei dan 17 Juni 2025 terkait tindak lanjut temuan penandaan dan tanggal 16 juni terkait temuan TMS hasil pengujian 2. Forum komunikasi kepada pelaku usaha (FONDASI) 9 Mei 2025 3. Inspeksi untuk penelusuran produk yang diduga dipalsukan penandaannya ke 3 sarena 4. Pembingkiran teknis identifikasi root cause dan penyusunan CAPA kepada pelaku usaha	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Penyusunan juknis penanganan cemaran mikrobiologi pada OBA 2. Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan UPT	Penandaan: TW 3 s.d TW 4	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Pelaksanaan pengawasan oleh UPT sesuai dengan standar dan pemilihan sampling dan metode pengujian sesuai dengan pedoman sampling sehingga hasil pengujian dapat menggambarkan OBA aman dan bermutu 2. Kenaikan jumlah sampel yang telah disampling dan diuji oleh UPT	
11	Percentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	capaian indikator belum mencapai target triwulan	Melakukan pertemuan dengan UPT untuk mengevaluasi capaian KU hingga Triwulan III 2025, mendorong pembinaan intensif kepada industri kosmetik, serta menyiapkan usulan penyesuaian target jika ditemukan gap	TW 2 sd TW 4	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Melakukan pertemuan pembahasan monev capaian IKU bersama UPT untuk meminta UPT agar mengintensifkan pembinaan kepada pelaku usaha distribusi kosmetik untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha. 2. Melakukan monitoring realisasi pencapaian target IKU hingga TW III 2025 untuk dilakukan usulan penyesuaian target apabila gap capaian signifikan.	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Melakukan pertemuan pembahasan monev capaian IKU bersama UPT untuk meminta UPT agar mengintensifkan pembinaan kepada pelaku usaha distribusi kosmetik untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha.	TW 2 sd TW 4	Terdapat peningkatan capaian sarana distribusi kosmetik		
12	Percentase iklan Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Capaian Indikator belum mencapai target Triwulan, hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan Definisi Operasional pada saat penyusunan Renstra dan telah dilakukan revisi target pada rancangan renstra terupdate	peningkatan kompetensi petugas UPT dan tindaklanjut kepada pelaku usaha terhadap temuan iklan	TW 2 s.d TW 4	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan Monev UPT tanggal 28 April 2025 Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan iklan OBA 1. Forum komunikasi kepada pelaku usaha (FONDASI) 9 Mei 2025 2. Desk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha pada 9 Mei 2025 dan 17 Juni 2025	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan forum pengawasan iklan bersama UPT dalam rangka efektivitas pengawasan iklan di media penyiaran lokal	TW 3 s.d TW 4	Agar dilakukan revisi Perjanjian Kinerja setelah penetapan renstra agar realisasi indikator dapat mencerminkan capaian kinerja		
13	Percentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Capaian Indikator belum mencapai target Triwulan, hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan Definisi Operasional pada saat penyusunan Renstra dan telah dilakukan revisi target pada rancangan renstra terupdate	Peingkatkan kompetensi petugas UPT dan tindak lanjut kepada pelaku usaha dalam temuan iklan	TW 2 s.d TW 4	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan Monev UPT tanggal 28 April 2025 Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan iklan OBA 1. Forum komunikasi kepada pelaku usaha (FONDASI) 9 Mei 2025 2. Desk percepatan tindak lanjut kepada pelaku usaha pada 9 Mei 2025 dan 17 Juni 2025	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan forum pengawasan iklan bersama UPT dalam rangka efektivitas pengawasan iklan di media penyiaran lokal	TW 3 s.d TW 4	Agar dilakukan revisi Perjanjian Kinerja setelah penetapan renstra agar realisasi indikator dapat mencerminkan capaian kinerja		
14	Percentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Capaian Indikator belum mencapai target Triwulan, hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan Definisi Operasional pada saat penyusunan Renstra dan telah dilakukan revisi target pada rancangan renstra terupdate	1. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Iklan Kosmetik bulan Januari – April 2025 2. Membatalkan surat edaran deputi terkait kategorisasi temuan penandaan minor dan mayor 3. Mengusulkan Perubahan target pengawasan iklan berdasarkan rekomendasi hasil audit BPK tahun 2024	TW 2 sd TW 4	1. telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Iklan Kosmetik bulan Januari – April 2025 pada tanggal 21 mei 2025 2. telah melakukan pembatalan surat edaran deputi terkait kategorisasi temuan penandaan minor dan mayor 3. telah Mengusulkan dan di setujui Perubahan target pengawasan iklan berdasarkan rekomendasi hasil audit BPK tahun 2024	Melakukan monitoring realisasi pencapaian target IKU hingga TW III 2025	TW III	Agar dilakukan revisi Perjanjian Kinerja setelah penetapan renstra agar realisasi indikator dapat mencerminkan capaian kinerja		
15	Percentase kabupaten/kota yang melaksanakan	Tidak dilaksanakan karena anggaran full diblokir								
16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam	Indikator diukur diakhir tahun								
17	Percentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai	Capaian indikator telah mencapai target triwulan	1. Pelaksanaan webinar uji praklinik/klinik 2. Desk konsultasi dan pendampingan penyusunan protokol uji praklinik dan klinik lebih intensif	TW III - TW IV	-	1. Pelaksanaan webinar uji praklinik/klinik 2. Desk konsultasi dan pendampingan penyusunan protokol uji praklinik dan klinik lebih intensif	TW III - TW IV	Tercapainya target indikator pada triwulan berjalan		
18	Percentase UKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	Capaian indikator telah mencapai target triwulan	Monev fasilitator dalam pendampingan kepada UMKM OBA dan Kosmetik	TW III - TW IV	1. Monev fasilitator dalam pendampingan kepada UMKM OBA dan Kosmetik 1 dan TW 2 2. Pendampingan UMKM di NTT 3. Rapat Tools Penilaian UPT dengan Roren dan UPT 4. Komunikasi intensif dengan ketua RMI PBNU untuk mempercepat penandatanganan MoU	Monev fasilitator dalam pendampingan kepada UMKM OBA dan Kosmetik	TW III - TW IV	Tercapainya target indikator pada triwulan berjalan		
19	Percentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program	Tidak dapat dilaksanakan karena anggaran diblokir								

No	Indikator	TRIWULAN II							Kondisi Akhir	
		Kondisi Awal	Rekomendasi	TimeLine	Program Rencana Aksi		Belum	Timeline		
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Rencana aksi yang belum selesai				
(1)	1 Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	capaian indikator yang telah mencapai target triwulan	1. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap UPT dalam pemenuhan kesesuaian sampling terhadap Pedoman Sampling serta pengawasan penandaan 2. Tindak lanjut kepada pelaku usaha temuan produk OBA tidak aman dan bermutu	TW 2 - TW4	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Monitoring pelaksanaan pengawasan OBA oleh UPT terkait penandaan dan pelaksanaan sampling pada tanggal 28 April 2025 dan 16 Juni 2025 2. Telah dikirimkan Nodin Direktur Pengawasan OTSK kepada P3OMN terkait hasil evaluasi hasil pengujian UPT 3. Pelatihan sampling plan bagi UPT dan Pelaku usaha dalam rangka jaminan mutu produk tanggal 23 Juni 2025	Intervensi terhadap tindak lanjut temuan pengawasan produk OBA TMS 1. Desk kepada pelaku usaha terkait iklan dan penandaan pada tanggal 9 Mei dan 17 Juni 2025 terkait tindak lanjut temuan penandaan dan tanggal 16 juni terkait temuan TMS hasil pengujian 2. Forum komunikasi kepada pelaku usaha (FONDASI) 9 Mei 2025 3. Inspeksi untuk penelusuran produk yang diduga dipalsukan penandaannya ke 3 saranra 4. Pembingkiran teknis identifikasi root cause dan penyusunan CAPA kepada pelaku usaha	Penandaan: TW 3 s.d TW 4	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan 1. Pelaksanaan pengawasan oleh UPT sesuai dengan standar dan pemilihan sampling dan metode pengujian sesuai dengan pedoman sampling sehingga hasil pengujian dapat menggambarkan OBA aman dan bermutu 2. Kenaikan jumlah sampel yang telah disampling dan diuji oleh UPT	Intervensi terhadap pelaksanaan pengawasan	
20	Percentase Industri Obat bahan Alam yang ditekan	Tidak dapat dilaksanakan karena anggaran diblokir								
21	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat	Tidak ada rekomendasi di TW 2	Tidak ada rekomendasi di TW 2							
22	Nilai Pembangunan Zi Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Capaian indikator diukur diakhir tahun	Peningkatan implementasi kebijakan reformasi birokrasi pada beberapa area, seperti efektivitas tata kelola, perbaikan sistem layanan publik, serta optimisasi peran sumber daya manusia.	TW 2 sd TW 4	• Semua unit sudah dilakukan desk dan penilaian oleh TPI (Inspektorat) dengan hasil: 1. Dit. Pengawasan Kosmetik lolos menuju WBBM 2. Dit. PMPU OT, SK, Kos lolos WBK 3. Dit. Reg OT, SK, Kos dan Dit Was OTSK tidak lolos pengajuan WBBM 4. Dit. Standard OTSK, Kos tidak menjadi prioritas penilaian karena WBK < 1 thn Berikut persiapan yang telah dilakukan untuk penilaian TPN (Kemenpan) A. Dit. Pengawasan Kosmetik yang lolos menuju WBBM telah melakukan beberapa hal, antara lain: 1. Telah menyusun Matriks Rekapitulasi Inovasi Pelayanan Publik yang telah diserahkan ke Inspektorat 2. Pedoman penanganan isu viral kosmetik telah disahkan dalam bentuk SOP Mikro POM-08.02/CFM.01/SOP.01/IK.44.02 tentang Penanganan Berita Viral Kosmetik 3. Melakukan penyusunan materi presentasi implementasi Zi di Ditiwaskos dengan penajaman evaluasi dampak inovasi yang dirasakan oleh masyarakat sampai pada level outcome (in progress) 4. Tetap melakukan pemantauan terhadap nilai IPP IPAK setiap bulan dan implementasi Zi pada setiap kelompok kerja 5. Mendokumentasikan video testimoni terkait beberapa program unggulan/inovasi yang dilakukan	1. Melaksanakan survei SPKP dan SPAK setiap bulan 2. Melakukan pemantauan terhadap WBS setiap bulan 3. Melaksanakan pengelolaan pengaduan setiap bulan 4. Melakukan pemantauan disiplin pegawai setiap bulan 5. Dit. Registrasi OTSKKK dan Dit. Pengawasan OTSK menunggu hasil LHE oleh Inspektorat untuk selanjutnya desk konsultasi oleh masing-masing unit	TW 2 sd TW 4	Tercapainya target indikator kinerja pada akhir tahun berjalan		
23	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Capaian indikator diukur diakhir tahun	Monitoring pelaksanaan SAKIP sesuai dengan pedoman	TW 2 sd TW 4	1. Telah melaksanakan pengisian LKE SAKIP pada tgl 1	1. Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan SA	TW 2 sd TW 4	Rekomendasi hasil penilaian SAKIP periode sebelumnya telah di tindaklanjuti. Penilaian SAKIP tahun 2025 masih menunggu jadwal pelaksanaan desk dari Inpektorat		
24	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Capaian indikator diukur diakhir tahun	1. Pengelolaan Kas oleh Bendahara Pengeluaran belum sepenuhnya optimal (belum full mekanisme CMS) 2. Pengelolaan TUP masih belum sesuai ketentuan (pertanggungjawaban TUP tidak sesuai dengan yang direncanakan) 3. Realisasi anggaran masih belum sesuai dengan RPD	1. Sosialisasi pengelolaan anggaran ke seluruh pegawai 2. Monit. pelaksanaan anggaran 3. Revisi RPD	1. Minggu kedua Juli 2025 2. TW 4 2025 3. Tiap akhir triwulan	1. Sosialisasi pengelolaan anggaran ke seluruh pegawai 2. Monit. pelaksanaan anggaran 3. Revisi RPD	sd TW IV	Nilai IKPA meningkat setiap periode		
25	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Capaian indikator diukur diakhir tahun	tidak ada rekomendasi sd TW II							

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Triwulan II / Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	83 Nilai	n/a	n/a	100%	Akan dilakukan perubahan indikator	Menyiapkan penetapan indikator pengganti melalui revisi PK
2		Jumlah Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontrolbus dalam penanganan stunting	1 Standar	n/a	n/a	0%	Anggaran untuk kegiatan ini seluruhnya diblokir, sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana	Mengusulkan ke Rorenkeu, agar target untuk kegiatan ini dihapus, bilamana anggarannya tidak tersedia
3	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.7 Indeks	n/a	n/a	100%	Penilaian baru akan dilakukan di TW III	Menyiapkan data dukung yang dibutuhkan dalam rangka penilaian
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang optimal	Nilai Pembangunan ZI	89	n/a	n/a	100%	saat ini dalam proses penilaian oleh Inspektorat	
5		Percentase Pemenuhan Dokumen SAKIP	55	55	100%	100%		
6		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	1	1	100%	100%		
7		Indeks Manajemen Risiko	2.9 Indeks	n/a	n/a	100%		

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Triwulan II / Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	62	66.74	107.65%	100%	1. Meningkatnya jumlah berkas permohonan registrasi obat bahan alam yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM dan pemutakhiran sistem registrasi online 2. Masih banyaknya permohonan registrasi obat bahan alam yang memerlukan tambahan data akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha	Meningkatkan kegiatan intensifikasi desk data permohonan registrasi dan/atau notifikasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha melalui penerbitan NIE
2		Persentase peningkatan jumlah varian produk Jamu yang terdaftar	10	9.13	91.30%	100%	1. Sebagian besar produk masih dalam tahap evaluasi karena pada akhir tahun 2024 dilakukan zero stock sehingga terdapat pembatasan pengajuan registrasi beberapa kategori, termasuk registrasi baru 2. Adanya efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya kegiatan pendampingan rutin ke daerah dalam rangka percepatan penerbitan izin edar	Melakukan pemantauan setiap bulan melalui penyelesaian berkas yang sudah masuk dengan identifikasi pada sistem berupa daftar baru Jamu dan lokal.
3		Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	55	59.17	107.58%	100%	1. Meningkatnya jumlah berkas permohonan registrasi suplemen kesehatan yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM dan pemutakhiran sistem registrasi online 2. Masih banyaknya permohonan registrasi suplemen kesehatan yang memerlukan tambahan data akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha	Meningkatkan kegiatan intensifikasi desk data permohonan registrasi dan/atau notifikasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha melalui penerbitan NIE
4		Persentase kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	82	87.38	106.56%	100%	1. Meningkatnya jumlah berkas permohonan notifikasi kosmetik yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM dan pemutakhiran sistem registrasi online 2. Masih banyaknya permohonan notifikasi kosmetik yang memerlukan tambahan data akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha	Kegiatan intensifikasi desk data permohonan registrasi dan/atau notifikasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha melalui penerbitan NIE

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kosmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar	Percentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar	35	38.43	109.80%	100%	1. Banyak berkas CAPA berulang akibat rendahnya komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan tentang DIP dan belum ditetapkannya peraturan yang mengatur pembatasan CAPA 2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang DIP sehingga data yang disampaikan tidak sesua	Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan DIP kepada pelaku usaha dan intensifikasi Penilaian DIP secara luring dan daring
6	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan	Percentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	90	90.31	100.34%	100%	Terdapat pemblokiran anggaran, sehingga pelaksanaan pendampingan dioptimalkan secara daring	Intensifikasi pendampingan penelitian uji praklinik dan uji klinik OBA secara luring dan daring dan pelaksanaan webinar uji praklinik/klinik
7	Olahan	Percentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif	88	93.46	106.20%	100%	Terdapat pemblokiran anggaran, sehingga pelaksanaan pendampingan dioptimalkan secara daring	Melaksanakan kegiatan pendampingan melalui kolaborasi dengan organisasi eksternal, misalnya asosiasi pelaku usaha dan melanjutkan kegiatan OSS Registrasi OBA, SK, dan Kos secara luring dan daring
8		Percentase peningkatan penelitian uji praklinik dan uji klinik jamu yang didampingi sesuai standar	8	8.33	104.13%	100%	1. Sedikitnya jumlah penelitian yang masuk disebabkan dana penelitian belum dapat dioptimalkan pada TW I 2. Peneliti belum dapat memenuhi baik terkait standardisasi bahan baku/produk jadi maupun metode uji sehingga belum sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku	Intensifikasi pendampingan penyusunan protokol uji praklinik/klinik
9	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima	Indeks pelayanan publik Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	4.7	n/a	n/a	100%	realisasi kinerja diukur di akhir tahun	Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) melalui pemenuhan data dukungsesuai ketentuan yang berlaku

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Terwujudnya tata kelola pemerintah Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	91.5	n/a	n/a	100%	Unit kerja sedang menyiapkan data hasil survey analisis dampak ekonomi terhadap inovasi pelayanan publik sebagai salah satu rekomendasi penilaian ZI tahun 2024	1.Melengkapi target prioritas dalam rencana kerja ZI 2.Melaksanakan survei analisis dampak inovasi pelayanan publik untuk mengukur dampak percepatan yang dirasakan oleh pengguna layanan 3.Pemantauan dan evaluasi terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam hal pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan publik 4.Pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi dilengkapi analisis dampak terhadap perbaikan kinerja 5.Peningkatan tindak lanjut pada pengelolaan pengaduan 6.Melaksanakan survei SPKP dan SPAK
11		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	78	80	102.56	100%	Tidak ada kendala	Meningkatkan kedisiplinan pelaksanaan anggaran sesuai RPD dan melakukan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu
12		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	55	55	100	100%	Tidak ada kendala	Meningkatkan kedisiplinan penyusunan dokumen SAKIP yang sesuai standar dan tepat waktu
13		Indeks Manajemen Resiko Dit. Registrasi OT, SK, dan kos	3.01	n/a	n/a	100%	realisasi kinerja diukur di akhir tahun	Unit kerja telah melaksanakan kegiatan Seminar Awareness Penerapan ISO 37001:2016

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Triwulan II / Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian TW II	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	5	6	7	9	10	11
1	Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos yang aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	15	15	100.00%	100	Tidak ada kendala	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring pelaksanaan KIE kepada kader FF UP dan SAKA POM Bogor hingga September 2025 - Koordinasi dengan FF UI untuk pembentukan penyuluh/kader (September 2025) - Pembahasan program Duta Obat dan Makanan Aman bersama Yayasan Puteri Indonesia - Pembahasan pelaksanaan program kerja sama dengan APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia)
2		Persentase Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Masyarakat di Bidang OBA,SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai Pedoman	10	11.63	116.30%	100	IKK Pemberdayaan Masyarakat di bidang OBASKK yang dilakukan oleh UPT tidak dilaksanakan pada tahun ini karena di UPT tidak ada tusi terkait pemberdayaan Masyarakat di bidang OBASKK	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan kajian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di UPT - Menyusun new initiative terkait kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - Monev penilaian UPT terkait pemberdayaan pelaku usaha di bidang OBASKK
3		Tingkat efektifitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89.34	89.357	100.02%	100	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan sistem pembayaran melalui KKP dan transfer langsung ke perorangan - Penjadwalan pelaksanaan KIE berikutnya bergantung Tomas dan tim 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan leaflet Cek KLIK dan BPOM Mobile - Pencetakan buku Kata BPOM - Pembayaran peserta KIE dibayarkan cash, honor narasumber dibayarkan melalui TA dengan surat perjanjian - Pemilihan responden yang akan diminta mengisi Survey Efektifitas KIE - Sisa 6 titik KIE diperkirakan dilaksanakan di TW 4
4	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM	Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	20	21.43	107.15%	100	Tidak ada kendala	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan UMKM OBAKos - Monev fasilitator UMKM OBA dan Kos - Monev Program Orang Tua Angkat OBA Kos - Sosialisasi program kerja sama kepada seluruh anggota PBNU seluruh Indonesia

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian TW II	Proyeksi Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	5	6	7	9	10	11
5	Layanan Publik Dit.PMPU OTSKK yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Direktorat PMPU OT,SK, Kos	n/a	n/a	n/a	100	Tidak ada kendala	- Pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Prima - Penyediaan Pojok Jamu - Persiapan Audit IPP/PEKPPP - Persiapan Konsultasi di Welfest 2025 - Pendampingan jemput bola obat bahan alam dan kosmetik
6	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan program sadar jamu aman	n/a	n/a	n/a	0	Anggaran untuk kegiatan ini seluruhnya diblokir, sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana	-
7	Tercapainya tata kelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha, OT, SK, Kos yang Optimal	Nilai Pembangunan Zi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT,SK dan Kos	n/a	n/a	n/a	100	Tidak ada kendala	- Pelaksanaan verifikasi lapangan oleh TPI 15-16 Juli 2025 - Pelaksanaan Jumat RB untuk meningkatkan engagement pegawai terkait RB
8		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat PMPU OT,SK, Kos	80	86	107.50%	100	Tidak ada kendala	- Pelaksanaan dan pemantauan kegiatan sesuai RPD dan POA - Percepatan pemberkasan Laporan Pertanggungjawaban - Koordinasi dengan Tim pelaksana serta Tim Keuangan di unit dan satker
9		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat PMPU OT, SK , KOS	55	55	100.00%	100	Tidak ada kendala	- Capaian RAPK TW II tahun 2025 (B07) - Laporan Evaluasi Internal TW II tahun 2025 (B07) - RKT tahun 2026 (B09) - Capaian RAPK TW III tahun 2025 (B10) - Laporan Evaluasi Internal TW III tahun 2025 (B10)
10		Indeks Manajemen Resiko Direktorat PMPU OT,SK, Kos	n/a	n/a	n/a	100	Tidak ada kendala	- Melanjutkan pembahasan daftar risiko - Update daftar risiko semester 2 di SAPA APIP sebelum tanggal 20 Juli 2025



BADAN POM



BPOM
Jl. Percetakan Negara No.23
Jakarta Pusat 10560
📞 02142484208
✉️ @deputi2@gmail.com
🌐 @deputi2badanpom